

Jepang yang multikultur? Wacana dan mitos homogenitas [1]

Chris Burgess

Translated by Dipo Siahaan with the assistance of Susy Nataliwati, Muhamamad Surya and Danarto Suryo Yudo

Tidaklah cukup untuk melawan satu mitos dengan menghancurkannya lalu menggantinya dengan mitos yang lain lagi, seperti misalnya mengkritik mitos bangsa yang homogen lalu menggantinya dengan mitos bangsa yang beragam (Oguma 2002:349)

Pengantar

Beberapa tahun belakangan ini kecenderungan arus migrasi global terlihat menjadi lebih stabil (OECD 2005: 17/53). Satu faktor penyebabnya mungkin adalah meluasnya atmosfer ‘kegelisahan’ dan ‘ketakutan’ global’, yang ditumbuhkan oleh laporan media tentang kekejaman teroris, flu burung, dan penyebaran senjata nuklir. Atmosfir semacam ini semakin mendorong menguatnya proses eskresi, oposisi, dan penghirkian, yang semuanya dikenal sebagai proses *Othering* (pelepasan) (Cahoone 1996:16). Ini terlihat terutama pada sikap dan kebijakan terhadap migrasi, khususnya penerapan kontrol imigrasi yang semakin ketat dan munculnya gerakan anti-imigran garis keras di banyak negara.

Jepang, sebuah negara adidaya ekonomi dengan infrastruktur media yang canggih, tidaklah kebal terhadap arus kecenderungan global tersebut. Walaupun begitu, wacana akademis yang dominan tentang Jepang pada umumnya, dibingkai dengan sebuah idealisme politik tentang ‘Jepang yang multikultur’. Wacana ini bertujuan untuk membuat wacana populer lainnya, yaitu tentang ‘Jepang yang homogen’, sebagai sebuah mitos. Hal ini dilakukan dengan mendasarkan dirinya pada data-data demografis dan ekonomi yang ‘faktual’ untuk menguatkan argumen tentang migrasi dari luar menuju Jepang sebagai suatu hal yang sulit dibendung. Makalah ini akan membahas tentang kesenjangan antara kecenderungan perkembangan wacana global tentang migrasi yang semakin bernada negatif dengan wacana ‘Jepang yang multikultural’ yang sangat positif. Saya hendak berargumentasi bahwa kegagalan memahami peran wacana populer sebagai elemen krusial dalam pembentukan realitas sosial Jepang dapat menghasilkan pemahaman yang bias tentang migran dan migrasi di Jepang.

1. Nihonjinron dan ‘Jepang yang multikultural’

Ada satu wacana yang cukup berpengaruh dalam Studi Jepang, yaitu wacana mengenai “Jepang yang multikultur”. Wacana ini dapat dilacak

pada sejumlah tulisan (seperti Aoki 1990; Befu 1987; Dale 1986; Mouer dan Sugimoto 1986; Yoshino 1992) yang merupakan kritik terhadap *Nihonjinron*. *Nihonjinron* sendiri adalah sebuah genre tulisan yang mengangkat keunikan kebudayaan Jepang. Mouer dan Sugimoto (1986: 406) mengatakan bahwa *Nihonjinron* memiliki dua paham utama, yaitu: (a) bahwa masyarakat Jepang memiliki 'keunikan' yang unik dan (b) Orientasi masyarakat Jepang adalah pada kelompok. Orientasi kelompok ini kemudian menjadi pola kebudayaan dominan yang membentuk perilaku orang Jepang. Premis utama *Nihonjinron* adalah bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang homogen (*tan'itsu minzoku*), yang membentuk sebuah bangsa yang secara ras sama (*tan'itsu minzoku kokka*).

Ironisnya, ada pendapat (Revell 1997:74) bahwa diskusi tentang identitas nasional Jepang semacam ini (*Nihonjinron* vs. Jepang yang multikultur) dimulai bukan oleh orang Jepang melainkan oleh orang Amerika, terutama oleh Ruth Benedict melalui bukunya (1946) *Pedang Samurai dan Bunga Seruni*.

Walaupun *Nihonjinron* adalah suatu istilah pendek yang mudah digunakan, tulisan-tulisan tentang paham tersebut sebenarnya sangat beragam dan mencakup sejumlah tema besar lainnya. Sebagai contoh, tulisan *best seller* Fujiwara (2005) berjudul "Gaya suatu Bangsa" (*Style of a Nation*), yang memberikan tekanan – dengan gaya *bushido* – tentang pentingnya perasaan dan semangat (*jyochō*) individual (bukannya kelompok), dipromosikan sebagai tulisan tentang *Nihonjinron* yang sangat berpengaruh (*epoch making*). Dalam sebuah survey – yang kemudian sering dikutip– oleh *Nomura Research Institute* pada tahun 1998, semua tulisan berkenaan dengan kepribadian, hasrat dan kepuasan yang bersifat nasional, etika kerja, sifat hemat, tepat waktu dan bahkan pandangan orang asing tentang kegiatan ekonomi masyarakat Jepang, semuanya dimasukkan dalam label *Nihonjinron* (Wikipedia 2006a). Revel (1997:74) mencatat bahwa dalam survey Nomura tersebut – acapkali dikutip sebagai bukti untuk menunjukkan seberapa meluasnya paham *Nihonjinron* itu – buku apa pun yang menggunakan kata 'orang Jepang' pada judulnya atau kata-kata yang 'jelas-jelas berkaitan dengan konsep ke-Jepang-an', selalu secara otomatis diklasifikasikan sebagai sebuah buku tentang *Nihonjinron* (lihat juga Yoshino 192: 227). Sebenarnya, menurut Revel (1997:74) , kebanyakan orang Jepang pun tidak menyadari paham pemikiran apa yang sedang mereka baca, dan perlu diberitahu. Jadi, sesuatu yang oleh seorang ahli (Befu, 2001:14) digambarkan secara sempit sebagai suatu jenis nasionalisme budaya yang dapat ditemukan di mana-mana,[2] oleh para akademisi dan penerbit, telah dijadikan sebagai sebuah istilah yang meliputi hampir semua tulisan – yang jarang berasal dari negara, bisa bersifat akademis atau *pseudo-akademis*, kebanyakan adalah tulisan populer, dan kadang hanya omong kosong – tentang masyarakat atau identitas kejepangan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Clammer (2001:10/66), *Nihonjinron* telah dianggap sebagai perwakilan dari semua pemikiran pribumi;

hampir semua pemikiran sosial orang Jepang dilihat dengan menggunakan lensa Nihonjinron dan “segala sesuatu yang berbau pribumi langsung dimasukkan dalam kelompok Nihonjinron (secara negatif).”

Walaupun kerap dianggap sebagai suatu ‘wacana’, Nihonjinron tampaknya kurang memiliki kesatuan atau koherensi internal yang bisa membuatnya dianggap sebagai satu sistem pengetahuan. Pun demikian, penerbitan buku-buku yang mengkritik paham Nihonjinron kemudian segera diikuti oleh sejumlah buku yang memposisikan dirinya berseberangan dengan – serta bertujuan untuk menolak – ‘wacana’ Nihonjinron. Gelombang tulisan pertama yang seperti ini umumnya dari para sarjana Jepang (seperti Komai 1992; Oguma 1993; Onuma 1993) yang semuanya sama-sama berupaya untuk ‘mengatasi’ ‘mitos homogenitas’ (*Tan’itsu minzoku no shinwa*). Di tahun 1995, ada dua buku – John Maher ikut menjadi salah satu editornya (Maher and Macdonald 1995; Maher and Yoshiro 1995) – yang membahas tentang keberagaman linguistik dan kebudayaan pada masyarakat Jepang, yang semua dikumpulkan dan diterbitkan dalam bahasa Jepang dengan judul “Menuju Tatanan Masyarakat Baru: Keberagaman Bahasa dan Kebudayaan di Jepang” (*Towards a New Order: Language and Cultural Diversity in Japan*, Maher dan Honna., 1994). Seperti gelombang pertama tulisan Jepang, tujuan Maher terutama adalah menanggapi pandangan Nihonjinron yang ‘berbahaya’.

Tujuan tulisan ini adalah untuk mempercepat proses penguburan yang akan menghabisi ketergantungan kronis pada tradisi monolingualis dan mono-kultural yang diciptakan dengan sengaja (Maher dan Yoshiro 1995:2)

Michael Weiner (1997), dalam “Minoritas di Jepang: Ilusi Homogenitas”, dalam nada yang sama, menantang ‘paradigma dominan’ homogenitas dengan menekankan adanya keragaman dalam masyarakat Jepang. Weiner (1997:xiii) berargumen bahwa Jepang adalah rumah bagi populasi yang sangat beragam, menentang “narasi dominan tentang homogenitas kultural dan ‘rasial’ yang mengabaikan keberadaan kelompok minoritas”. Dalam tulisan tersebut, pembaca jarang diberitahu siapa sebenarnya yang pernah mengatakan bahwa Jepang itu homogen, yang terlihat dari kurangnya referensi mengenai hal itu. Namun, berbagai penulis berebut untuk membongkar ‘mitos’ homogenitas, yang sepertinya telah berubah menjadi semacam orang-orangan sawah canggih.

Dari pertengahan 1990an, sejumlah buku tentang pemukiman migran di Jepang mulai bermunculan (misal Komai 1995b; Miyajima dan Kajita 1996; Weiner dan Hanami 1998). Segera setelah itu, kata ‘multikultural’ menjadi jamak dipakai dalam banyak tulisan. Buku yang menawarkan ‘perspektif multikultural’ tentang ‘Nihonjinron di akhir Abad Duapuluh’, dari Mouer dan Sugimoto (1995: 242) adalah yang pertama meneliti secara kritis genre Nihonjinron. Dalam buku tersebut ada bab yang diberi judul ‘Jepang yang Multikultur’. Namun,

walaupun bab tersebut sebenarnya hanya membahas tentang sejumlah variasi sosial di dalam masyarakat, tulisan tersebut menandai dimulainya *boom* wacana ‘Jepang yang Multikultural’. Sebagai contoh, di tahun 1996, Denoon et al menerbitkan ‘Jepang Multikultural’ (*Multicultural Japan*), sebuah buku yang bertujuan untuk menantang pandangan ‘konvensional’ tentang masyarakat Jepang sebagai masyarakat yang mono-kultur dan homogen (McCormack 1996). Seperti dilakukan oleh Mouer dan Sugimoto, Denoon et al menggunakan terminologi ‘multikultural’ untuk memberi penekanan pada variasi dan keberagaman yang ada di dalam masyarakat Jepang, keragaman yang mereka tegaskan telah memiliki sejarah panjang. Sugimoto (1999:93) mendefinisikan paradigma multikultural sebagai sesuatu yang:

Mencakup seluruh etnis minoritas dalam masyarakat Jepang... (istilah) multikultural di sini terdiri dari berbagai pengelompokan sub-kultural, termasuk contohnya, budaya perempuan, budaya pekerja paruh-waktu, budaya orang difabel, budaya anak muda, budaya homoseksual, dan seterusnya.

Masalahnya adalah ketika beberapa penulis (misal Sugimoto 1997: Bab I) menggunakan istilah ‘masyarakat multikultural’ sebagai ‘jalan pintas’ untuk menggambarkan variasi-variasi dalam masyarakat – yang memang selalu ada –, beberapa penulis lain mulai menggunakan istilah itu untuk menggambarkan munculnya di Jepang suatu *political ideal* yang identik dengan fenomena yang telah muncul di negara-negara seperti Australia, Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1970an. Dalam kasus Jepang, kemunculan ‘multikulturalisme’ sebagai *political ideal* sering dianggap disebabkan oleh masuknya kelompok pekerja dari Asia yang berbeda secara rasial – atau, jelas terlihat asing – pada tahun 1980an (Lie 2001:18). Contoh-contoh karya dari genre ini (yang mengangkat ‘Jepang yang multikultur sebagai *political ideal*) termasuk adalah buku yang diedit oleh Douglass dan Roberts (2000) dalam sub-judul ‘*the advent of a multicultural society*’; tulisan Hiroshi Komai (2006) *Gurobarujidai no Nihon-gata Tabunkakyoseishakai (Japanese Style Multicultural Society in the Global Era)*; dan buku yang diedit oleh Graburn et al (akan terbit), yang membahas tentang ‘berbagai bentuk multikulturalisme yang berkembang dan saling bersaing’. Hal yang akan terjadi seiring dengan kedatangan para pendatang asing ke Jepang dan akan merubah wajah Jepang pada tingkat akar rumput. Di sini, multikulturalisme merujuk bukan pada kondisi suatu masyarakat namun lebih kepada ‘pengadopsian suatu bentuk ideal kebijakan publik’ (Graburn dan Ertl, akan terbit), sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah pekerja asing dan migran lainnya. Di bawah, saya akan menganalisa bagaimana kedua makna ‘Jepang yang Multikultural’ tersebut digunakan, baik dengan maksud untuk menggambarkan variasi sosial yang terus ada (1.1) dan yang menggambarkan suatu *political ideal* (1.2).

1.1. ‘Jepang yang Multikultural’ Sebagai Konsep Variasi Sosial

Pemahaman tentang adanya variasi sosial dalam masyarakat Jepang adalah paham yang tidak kontroversial. Sebagaimana dicatat oleh Morris-Suzuki (1998: 156/192), jika kebudayaan dianggap sebagai kepemilikan atas seperangkat ilmu, nilai, dan pengalaman yang sama, maka setiap masyarakat sosial secara definisi bersifat multikultural: kebudayaan pada dasarnya selalu bersifat 'multi'. Namun demikian, perhatian terhadap perbedaan (yang memang selalu ada di Jepang) mungkin telah beranjak terlalu jauh. Ryang (2005: 10/201) menyerukan kewaspadaan terhadap apa yang dia sebut sebagai 'kecenderungan terkini dan terbaru untuk menyajikan Jepang melalui ... sudut pluralistis' dengan semakin meningkatnya perayaan atas keberagaman, kemarginalan dan minoritas. (Hal ini karena) di satu sisi, perhatian berlebihan terhadap etnis minoritas cenderung – sebagaimana ditunjukkan oleh Clammer (2001:7) – mengaburkan dimensi perbedaan lainnya seperti gender dan kelas sosial,[3] sekaligus juga mengalihkan perhatian dari bagaimana perbedaan itu terus dipertahankan. Selain itu, bahkan penggabungan berbagai jenis perbedaan pun punya bahayanya sendiri. Mengutip tulisan Maher dan MacDonald (1995) "Keragaman dalam Kebudayaan dan Bahasa Jepang" (*Diversity in Japanese Culture and Language*) sebagai contoh, Ryang menggarisbawahi bahayanya menggabungkan (dan mengabaikan perbedaan internal) berbagai keragaman sub-kultural – seperti sub-kultur perempuan pecandu tubuh langsing (*anorexic*), sub-kultur anak-anak mantan perantau, kultur Ainu, dan kultur migran Korea – dalam satu kelompok:

Terminologi 'keragaman' dan 'peminggiran' perlu diletakkan dalam perspektif yang wajar... hanya mengelompokkan segala sesuatu yang marginal sebagai bagian buntut dari yang dominan dapat berakibat *counter-productive*, karena hal itu dapat mengaburkan kekhususan sosial serta sejarah diskriminasi dan penindasan yang pernah dialami oleh tiap kelompok (Ryang 2005:2002/3).

Masalah lain adalah bahwa wacana 'Jepang yang multikultur', yang menempatkan dirinya sebagai oposisi langsung terhadap 'wacana' Nihonjiron, dalam derajat tertentu melegitimasi dan memperkuat wacana Nihonjinron tersebut dan membuat wacana 'Jepang yang multikultur' rentan terhadap masalah-masalah yang sama dari 'ideologi' yang sebenarnya hendak ia hancurkan:

[Mouer dan Sugimoto] masih memilih membingkai argumen mereka dalam kerangka perdebatan tentang Nihonjinron, walaupun mereka seharusnya menyerang asumsi-asumsi salah ideologi tersebut ... Jadi, Nihonjiron tetap berada di garis depan debat-debat akademis, terutama secara internasional, justru oleh mereka yang menyangkal legitimasinya... secara paradox, perhatian para ilmuwan pada Nihonjinron... malah justru berhasil memperkuat daripada melemahkan pandangan tentang Jepang sebagai entitas kultural dan sosiologis yang monolitik. (Clammer 2001: 67)

Clammer (2001:25/96) kemudian mencatat bahwa banyak karya ilmiah dalam bidang studi Jepang masih didominasi oleh ‘mode kategorikal’, terfokus pada ‘prinsip-prinsip klasifikasi’ yang dianggap dapat menangkap ‘kenyataan’ yang membentuk Jepang. Oleh karena itu, sebagaimana halnya tulisan-tulisan tentang *nihonjinron* menggunakan kata kunci seperti *amae*, *kanjinshu*, *bokashi*, *ganbari*, untuk menggambarkan inti dari masyarakat Jepang, demikianlah penulis anti-nihonjinron akan terus berusaha menjelaskan masyarakat Jepang dengan menggunakan konsep-konsep seperti *seishin*, *wrapping*, dan *uchi/soto*:

[U]paya untuk mengusulkan model masyarakat Jepang sebagai model tandingan dari premis Nihonjinron dipenuhi dengan cacat-cacat sama dari ide Nihonjinron, karena keduanya pada dasarnya sama-sama merupakan generalisasi yang berlebihan (Ryang 2005:220)

Ryang (2005:158/84) melanjutkan menjelaskan bahwa walaupun secara intelektual beresiko, bahkan tidak masuk akal, untuk menyampaikan suatu pandangan tentang, misalnya, masyarakat Amerika Serikat dalam satu prinsip yang mampu mencakup semua, hal yang sama tidak berlaku untuk tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang Jepang. Orang bisa berspekulasi bahwa penekanan akhir-akhir ini tentang ‘keragaman’ di Jepang – karena terminologi itu dibingkai dengan mengkontraskannya dengan ide ‘homogenitas’ – sebenarnya hanyalah mempertegas konsep ‘kelompok minoritas’, dan mengafirmasi imaji monokultural tentang Jepang dan semakin menguatkan generalisasi yang penuh dengan stereotip.

1.2. ‘Jepang yang Multikultur’ Sebagai *Political Ideal*

Sebagaimana ditunjukkan dari awal, dimana beberapa orang penulis menggunakan istilah ‘Jepang yang Multikultural’ sebagai cara ringkas untuk menggambarkan variasi-variasi sosial yang sudah ada sejak dahulu kala, beberapa penulis lain menggunakannya untuk merujuk pada suatu ideologi politik yang baru – dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyertainya – yang tampaknya muncul sebagai respons atas meningkatnya jumlah migran di Jepang. Istilah multikulturalisme sendiri sebenarnya bisa diartikan baik sebagai suatu kondisi ideal (suatu ideologi) ataupun sebagai serangkaian kebijakan resmi yang pernah diadopsi oleh para pemerintah di sejumlah ‘*settlement countries*’ (negeri-negeri menjadi tempat tujuan para migran, seperti Kanada dan Amerika Serikat) dari sejak 1970an. Walau ada berbagai versi, paham multikulturalisme pada dasarnya adalah perayaan tentang – dan sebuah pelajaran tentang pentingnya mempertahankan – kesetaraan dan keberagaman budaya. Pada suatu masyarakat multikultural, *co-existence* (hidup berdampingan), toleransi, saling menghormati, dan pertukaran budaya dianggap akan membawa kebaikan pada seluruh bangsa. Walaupun dukungan pada multikulturalisme tidak selalu dipandang sebagai dukungan terhadap imigrasi, pada prakteknya kepercayaan terhadap paham

multikulturalisme didasari atas kepercayaan terhadap pentingnya migrasi.

Untuk menguji validitas terminologi 'Jepang yang multikultur' dalam bingkai *political ideal*, kita bisa melakukannya dengan menanyakan tiga pertanyaan berikut. Pertama (1.2.1), apakah ada ideologi populer di Jepang yang memandang keragaman etnis, kultural dan rasial serta migrasi sebagai suatu hal yang positif? Kedua (1.2.2.), secara konkrit, kebijakan 'multikultural' macam apakah yang telah diadopsi pemerintah Jepang, khususnya dalam hal perlakuan terhadap penduduk non-warga negara dan kelompok-kelompok etnis minoritas? Ketiga (1.2.3), apakah ada sejumlah besar migran yang hadir (serta merubah) masyarakat Jepang dan apakah angka ini bertambah terus?

1.2.1. Wacana Multikulturalisme

Dalam hal pertanyaan pertama, penting untuk diingat bahwa sebuah wacana tidak bisa dibilang sebagai 'betul' atau 'salah', [4] dan bahwa suatu wacana akan menjadi sebuah kenyataan sosial atau *conventional knowledge* (pengetahuan umum) ketika diinternalisasikan, disirkulasikan dan digunakan oleh suatu populasi. Sebagai contoh, seperti dikemukakan oleh Ryang (2005:29/chapter 2) dan Goodman (1992:5), buku Benedict Anderson, yang terjual hingga 2,3 juta kopi dalam bahasa Jepang, telah begitu tersebar dan terinternalisasi dalam masyarakat Jepang hingga buku tersebut telah membantu menciptakan suatu pandangan dunia tertentu (dalam masyarakat Jepang). Karena itu kritik terhadap ide Nihonjiron sebenarnya kurang tepat karena menggambarkan ideologi tersebut sebagai 'narasi besar' atau 'wacana yang mencakup semua' (Weiner, 1997) yang 'terus mendominasi dan menembusi' (Sugimoto 1997:ix), tapi dalam satu tarikan nafas yang sama, kemudian menyangkalnya dengan menyebutnya sebagai sebuah 'mitos', 'ilusi', atau 'salah secara empiris' (Clammer 2001:3). Penting untuk memahami bahwa ideologi dominan bukanlah sesuatu yang 'salah' yang terpisah dari kebudayaan Jepang yang 'asli', namun sebenarnya selalu merupakan bagian dari suatu sistem pikiran yang merefleksikan dan membentuk kenyataan sehari-hari.

Satu ilustrasi tentang pentingnya untuk tidak melihat wacana sebagai 'benar' atau 'salah' adalah isi dari dan reaksi atas komentar politisi arus-utama tentang kehomogenan Jepang. Pada tahun 1986, Perdana Menteri saat itu, Nakasone, mengatakan bahwa Jepang memiliki standar pendidikan yang tinggi karena kehomogenan rasnya, kontras dengan Amerika dimana keberadaan orang-orang berkulit hitam dan Puerto Rico menyebabkan standar pendidikan menjadi rendah. Hampir dua puluh tahun kemudian, pada bulan Oktober 2005, *Internal Affairs and Communications Minister*, yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri, Aso Taro, menggambarkan Jepang sebagai "satu negara, satu peradaban, satu bahasa, satu kebudayaan, dan satu ras" (Harian Yomiuri 2005b).[5] Akhirnya pada bulan Februari 2007, Menteri Pendidikan, Ibuki Bunmei, memuji kehomogenan rasial Jepang.

Hal paling mencolok dari semua komentar ini adalah semua umumnya tidak kontroversial di dalam negeri. Komentar-komentar tersebut tidak terlalu diperhatikan di koran-koran utama berbahasa Jepang, dan keluhan dari organisasi Ainu, *Utari Kyokai*, secara umum tak terdengar. Kasus Nakasone baru diangkat media Jepang setelah kasus tersebut menjadi perbincangan di media-media di Amerika. Komentar-komentar lain, seperti yang diucapkan oleh Walikota Tokyo, Ishihara, pada bulan April 2000, tentang orang asing yang akan menimbulkan kerusuhan bila ibukota dihantam oleh gempa bumi besar, mendapatkan perhatian media domestik yang lebih besar. Namun itu terutama karena penggunaan kata '*sangokujin*' oleh Ishihara, istilah yang merendahkan untuk orang-orang asal Taiwan dan Korea yang tinggal di Jepang. Seorang wartawan Inggris, di depan Ishihara yang terlihat takjub, berkata bahwa bila seorang politisi Inggris mengeluarkan komentar merendahkan semacam itu pasti akan ada komentar balik besar-besaran (Asahi Shimbun, 2000). Namun demikian, dalam kasus-kasus tersebut tidak ada satupun tuntutan kepada mereka untuk mengundurkan diri. Itu karena ketiganya memang berbicara dalam wacana konvensional yang populer[6], yang memandang Jepang sebagai homogen dan kejahatan oleh orang asing dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan publik.

Bila menengok terhadap sikap publik kontemporer terhadap migrasi, survey-survei terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa orang Jepang cukup konservatif dalam isu ini. Poling opini menunjukkan bahwa jumlah orang yang merasa gelisah terhadap kondisi keamanan publik (*chian*) telah berlipat ganda sejak 1998 (Sekai 2004:147). Dalam survey terbaru Kantor Kabinet (2006), 84,3% responden menganggap bahwa keamanan publik semakin memburuk dalam 10 tahun terakhir, dengan sebagian terbesar (55.1%) menganggap bahwa hal itu disebabkan oleh 'meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh orang asing yang ada di Jepang' (lihat juga Yomiuri Shimbun 2005). Dalam poling Kantor Kabinet lainnya (Harian Yomiuri 2004b) yang dibuat untuk mengukur opini publik tentang penerimaan tenaga kerja asing di masa depan, hanya 16,7% responden menganggap Jepang perlu menerima pekerja asing tanpa syarat, walaupun sebagian besar responden memang mendukung penerimaan tenaga kerja asing yang memiliki ketrampilan. Tapi, bahkan dukungan ini pun umumnya bersyarat, dengan banyak orang berkata bahwa Jepang belum memiliki infrastruktur memadai untuk menangani gelombang masuk pekerja asing. Hasil poling yang sama terlihat juga di poling yang dikeluarkan oleh Keidanren [7] (Japan Times 2004a) dan Menteri Kehakiman (Homusho Nyukoku Kanrikyoko 2005), yang menemukan adanya dukungan bagi tenaga kerja asing yang berketrampilan, perlunya waspada terhadap masuknya tenaga kerja asing tak berketrampilan, dan pentingnya kontrol imigrasi yang lebih ketat. Secara keseluruhan, kata-kata yang sering didengar dalam diskusi-diskusi tentang migrasi adalah 'perlunya lebih banyak debat publik' (*kokuminteki giron*) sebelum

mencapai konsensus apa pun. Temuan ini tampaknya menunjukkan tidak adanya wacana populer tentang multikulturalisme.

Hal ini tentu tidak dimaksudkan untuk menyangkal keberadaan wacana alternatif, seperti *kokusaika* (internasionalisme) pada tahun 1980, atau mengecilkan kerja-kerja luar biasa yang dilakukan oleh NGO-NGO lokal yang, sambil mengembangkan wacana *tabunka shakai* (multikulturalisme), bekerja tanpa kenal lelah dalam membantu dan mendukung orang-orang non Jepang yang tinggal di Jepang. Poin yang ingin diberikan adalah bahwa dengan semakin tegangnya situasi dunia, semakin negatifnya perilaku global terhadap migrasi dan multikulturalisme, ditambah dengan insiden-insiden global yang diliput luas seperti kerusuhan etnis musim gugur 2005 di Perancis, tampaknya sangat kecil kemungkinan media-media *mainstream* Jepang akan mengadopsi ideologi multikultural dalam waktu dekat.

1.2.2. Kebijakan Multikulturalisme

Jika multikulturalisme sebagai suatu wacana pada level nasional umumnya tidak ada di Jepang, bisa diduga pula bahwa kebijakan konkrit tentang hal itu pun akan absen pula. Kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi di *settlement countries* (negeri tujuan migran) dimana paham multikulturalisme paling tidak pernah diterapkan dan dikembangkan sebagai kebijakan resmi pemerintah adalah:

- * dwi kewarganegaraan (*dual citizenship*)
- * dukungan pemerintah terhadap koran, televisi, dan radio yang menggunakan bahasa kaum minoritas
- * dukungan bagi festival, hari besar, dan perayaan kaum minoritas
- * penerimaan baju keagamaan dan tradisional di sekolah dan masyarakat secara umum
- * dukungan untuk kesenian dari berbagai kebudayaan di dunia
- * adanya program untuk mendorong representasi minoritas di komunitas yang lebih besar, dalam politik, pendidikan, dan angkatan kerja
- * kebijakan imigrasi yang liberal, penerimaan pengungsi
- * penghormatan terhadap hukum internasional

Sumber: diadaptasi dari Wikipedia (2006b) [8]

Pertama, Jepang tidak secara resmi mengenal dwi kewarganegaraan. Sejak 1985, anak-anak dari pasangan Jepang - non Jepang tidak bisa mendapatkan dwi kewarganegaraan, namun mereka diminta untuk memilih salah satu kewarganegaraan ketika mereka berusia dua puluh tahun. Kedua, sedikit sekali hal yang membuktikan adanya dukungan pemerintah terhadap media 'etnis'. Buku "Pedoman Media Etnis" karya Moriguchi (1997) mendaftar ada sekitar 160 publikasi dalam 15 bahasa selain bahasa Jepang di Jepang, sedangkan Shiramizu (2000; 2004) mencatat ada 200 publikasi, sebagian besar berbahasa Inggris, Cina, Korea, dan Portugis, dan umumnya disertai dengan terjemahan

bahasa Jepang. Namun demikian, meski beberapa penerbit memang memiliki angka penjualan hingga puluhan ribu eksemplar, sebagian besar publikasi tersebut dijalankan oleh sekelompok kecil relawan atau oleh NGO dengan sirkulasi peredaran yang kecil. Poin kuncinya adalah kurangnya dukungan pemerintah nasional dan, sehubungan dengan itu, kurangnya media etnis yang bersifat nasional – walaupun pemerintah lokal memang mengeluarkan *newsletter*, majalah, brosur yang multibahasa. “Pemerintah lokal di daerah-daerah yang paling terpengaruh oleh imigrasi baru mengisi kekosongan”, tulis Pak (2000:244), “yang disebabkan oleh ketidaksediaan pemerintah nasional untuk melakukan sesuatu bagi para migran asing yang hidup di Jepang.”

Sikap *laissez-faire* pemerintah nasional juga berlaku untuk kebijakan-kebijakan multikultural potensial lainnya. Dukungan terhadap hari festival, hari besar, dan hari perayaan kelompok-kelompok minoritas praktis tak pernah didengar, walaupun banyak agen lokal, umumnya dengan bantuan NGO, mengadakan acara *kokusai koryu* (pertukaran internasional) dimana kebudayaan asing diperkenalkan. Memang ada perhatian dan aktivitas yang tinggi di tingkat akar rumput tentang praktek-praktek kebudayaan asing (musik, makanan, bahasa). Perhatian ini mungkin muncul, ironisnya, dimotivasi oleh perasaan terkekang yang timbul dari masyarakat dan kebudayaan Jepang yang relatif ‘homogen’. Terlebih lagi, sejak 2002, mata pelajaran *Kokusai Rikai Kyoiku* (Pendidikan untuk Pemahaman Internasional) telah menjadi bagian wajib dari kelas-kelas *sogokushu* (Pengetahuan Umum) di sekolah-sekolah. Namun, kritik atas ‘pendidikan multikultural’ (Fukatsu 2003:204; Mitsuaki dan Akuzawa 2001:104/5; Nukaga 2003:89/90) maupun ‘pertukaran internasional’ (Nakamatsu 2002; Suzuki 2000), keduanya menganggap sekolah-sekolah ini dan ‘acara-acara’ komunitas tersebut sebenarnya lebih memperkuat stereotip daripada menghancurkannya.[9] Akhirnya, tentang penerimaan baju tradisional dan religius di sekolah-sekolah dan masyarakat secara umum, insiden kekerasan verbal dan fisik yang berulang-ulang atas murid-murid yang menggunakan baju tradisional Korea Chima-Chogori (Song 2003) menunjukkan kurangnya toleransi di ruang publik.

Dalam nada yang lebih positif, dukungan Jepang terhadap kesenian kebudayaan dari seluruh dunia sangat baik. Sebagai contoh, Agensi Kebudayaan mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mempromosikan pertukaran kebudayaan, serta juga mempromosikan kebudayaan asli Ainu. Pencanangan Tahun-tahun Pertukaran Nasional membuat para artis pertunjukan, seniman, dan tokoh kebudayaan bisa mengunjungi Jepang dari negara-negara asing. Expo tahun 2005 di prefektur Aichi, khususnya, merupakan sukses luar biasa, mengenalkan pada lebih dari 22 juta orang pengunjung tentang beragam kebudayaan dan organisasi dari seluruh dunia.

Contoh lain dari praktek konkrit multikulturalisme adalah dukungan resmi pada program-program yang hendak mendorong representasi minoritas di masyarakat yang lebih luas, dalam politik, pendidikan, dan angkatan kerja. Bila kelompok minoritas terbesar di Jepang – orang Korea – diambil sebagai contoh, catatannya tidak terlalu baik. Banyak pengamat (Komai 2001: bab 1) mencatat adanya rasisme yang terinstitusionalisasi terhadap orang Korea di Jepang. Rasisme ini memunculkan diskriminasi di area seperti sekolah, pekerja, pernikahan, dan perumahan. Di dalam politik, Fukuoka (2000:xxiv/253) menggarisbawahi tiga isu kunci. Pertama adalah isu mengenai hak memilih bagi Penduduk Permanen Khusus/*Special Permanent Resident* (kebanyakan orang Korea) dalam pemilihan umum lokal (Fukuoka 2000:258/9). Walaupun banyak negeri ‘tujuan migran’ (*settlement countries*) tidak memberikan hak memilih bagi penduduk non-warga negara, para *zainichi* ini merupakan kasus sejarah yang unik. Bahkan, pemerintahan Korea Selatan secara konsisten menekan Jepang dalam isu ini. Walaupun demikian, masalah ini berulang kali ditunda pembahasannya di Diet, sementara rancangan undang-undangnya tidak pernah diajukan karena ‘ketiadaan waktu’ (Yomiuri Shimbun 2004b). Melihat kondisi semakin tingginya penolakan terhadap emansipasi warga Korea (Yomiuri Shimbun 2004c), terutama dilatarbelakangi oleh memburuknya hubungan antara Korea Utara dan Selatan, kesediaan politis (*political will*) yang semakin menipis berarti bahwa rancangan undang-undang itu semakin tipis kemungkinannya akan disahkan.

Area kedua yang digarisbawahi oleh Fukuoka adalah masalah tidak bisanya lulusan Sekolah Swasta Etnis Korea mengikuti Ujian Masuk ke Universitas Nasional Jepang tanpa sebelumnya mengambil ujian kualifikasi tersendiri dahulu (Fukuoka 2000, 254/5). Saat ini, sekolah Korea dimasukkan dalam kelompok ‘lain-lain’ dan tidak ada skema akreditasi apa pun yang bisa memberikan murid-murid sekolah ini status yang sama dengan murid-murid sekolah Jepang, dengan demikian membatasi kemampuan mereka mengakses pendidikan tinggi dan akhirnya juga membatasi pilihan karir mereka. Fakta aktualnya, karena universitas-universitas Jepang saling bersaing mendapatkan siswa dari jumlah yang semakin kecil, mereka lebih bersedia untuk menerima lulusan dari sekolah yang berbeda-beda. Inilah yang mendorong MEXT (*Ministry of Education, Culture, Sport and Technology*/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Teknologi – penerjemah) untuk secara resmi mengakui sejumlah kecil – jumlahnya semakin bertambah – sekolah internasional ‘bergaya barat’. Pun begitu, ini sebenarnya lebih merupakan reaksi atas suatu kondisi tertentu daripada suatu kebijakan multikultural yang aktif; faktanya adalah, sampai tahun 2003, pemerintah tidak mengenali sekolah non-Jepang apa pun sebagai institusi pendidikan terakreditasi dan sampai sekarang masih belum mengenali sekolah etnis Korea (atau etnis mana pun) (Morris Suzuki 2003; Arita 2003).

Area ketiga terkait dengan pengangkatan warga asing sebagai pejabat publik. Pada bulan November 1996, Kementerian Urusan Dalam Negeri merubah klausa kebangsaan di Hukum Pekerja Publik agar pemerintah lokal dapat menyewa tenaga kesehatan non-Jepang, perawat anak-anak, dan suster (Gurowitz 1999:441). Pada tahun yang sama, Pengadilan Negeri Tokyo menolak gugatan Chong Hyang Gyun, warga asing pertama yang dipekerjakan sebagai pekerja kesehatan di pemerintah metropolitan. Chong Hyang Gun mengajukan gugatan karena di tahun 1994 lamarannya untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat ditolak (Harian Yomiuri 2005a). Tahun 1997, Pengadilan Tinggi Tokyo membalik keputusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri, dengan menyatakan bahwa tidak ada alasan konstitusional apa pun untuk menolak hak bagi warga negara non-Jepang untuk menjabat posisi-posisi publik di luar posisi-posisi yang terkait langsung dengan pelaksanaan kekuasaan publik (lihat juga Kagawa 2001:101; Yomiuri Shimbun 1997). Namun, pada tahun 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penolakan tersebut konstitusional karena Chong Hyang Gyun bukan orang Jepang (Harian Yomiuri 2005a). Kabarnya, keputusan itu mengagetkan pemerintah lokal daerah lain, seperti Kochi, Kawanashi dan Kawasaki, yang sebenarnya telah mulai melonggarkan peraturan untuk menerima warga asing di posisi-posisi manajerial.

Berlawanan dengan kejadian-kejadian tersebut yang membatasi akses warga non-Jepang terhadap posisi-posisi publik, keputusan pemerintah Jepang untuk menerima (hingga) 1000 perawat dan pekerja kesehatan dari sejak April 2007 sekilas menunjukkan kebijakan imigrasi yang lebih liberal (Daily Yomiuri 2006d). Keputusan tersebut, yang merupakan bagian dari perjanjian FTA yang baru ditandatangani, adalah gaung dari proposal yang pernah diajukan sebuah panel kunci bentukan pemerintah untuk membahas tentang deregulasi agar membolehkan orang asing bekerja di area-area kesejahteraan sosial dan keperawatan dalam rangka menangani populasi yang semakin menua (Yomiuri Shimbun 2006). Pada satu sisi, keputusan tersebut merupakan reaksi praktis terhadap faktor-faktor ekonomi, yaitu pertambahan permintaan untuk sektor kesejahteraan dan ketersediaan tenaga kerja domestik yang menyusut. Namun demikian, hukum yang sama mensyaratkan sejumlah hal tertentu –seperti lancar berbahasa Jepang dan lulus ujian negara atau kursus-kursus tertentu yang diadakan dalam satu periode tertentu – yang sebenarnya cukup berat sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah memang akan ada banyak orang Filipina yang akan dapat tinggal di Jepang sebagai pekerja. Perkembangan lain, seperti pemeriksaan imigrasi (Yomiuri Shimbun), hukuman terhadap orang asing ilegal yang semakin keras (Harian Yomiuri 2004a), data daring (*online*) tentang orang asing (Harian Yomiuri 2005d), pengumpulan sidik jari dan foto orang asing yang masuk (Harian Yomiuri 2006a), dan sistem kartu identifikasi baru bagi orang asing (Harian Yomiuri) semuanya menunjukkan, senada dengan kecenderungan global, semakin mengerasnya kebijakan imigrasi Jepang, yang sebelumnya memang sudah keras.

Kebijakan imigrasi Jepang yang keras juga diilustrasikan dari jumlah pengungsi dan pencari suaka yang diterima pemerintah. Pada periode dari 1982 – ketika Jepang pertama kali menerima pengungsi – hingga 2004, Jepang telah memproses lebih dari 3.544 aplikasi untuk status pengungsi, namun hanya menerima 313, kurang dari 10% (Japan-Almanac 2005:90). Walaupun persyaratan untuk penerimaan pengungsi dilonggarkan pada bulan April 2004, pada tahun 2005 hanya 46 orang saja yang diterima sebagai pengungsi (JAR 2006: lihat juga Iwasaki 2006). Kontras dengan Amerika Serikat yang menerima 53,813 orang sebagai pengungsi dan 25,257 orang sebagai pencari suaka pada tahun 2005 saja (Statistik 2006).

Contoh lain yang menggambarkan kerangka kebijakan Jepang yang tidak multikultural adalah sikapnya terhadap hukum internasional. Sebagai contoh, baru pada tahun 1995 yang lalu Jepang menjadi salah satu negara terakhir yang meratifikasi Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERC*) yang telah disusun sejak 1969 (Sugimoto 1997:189). Pada bulan Oktober 1999, ICERC dipraktekkan untuk pertama kalinya oleh sistem peradilan domestik ketika pengadilan memenangkan seorang jurnalis Brazil untuk tuntutan ganti rugi sebesar ¥ 1,5 juta setelah dilempar keluar dari sebuah toko hanya karena dia adalah seorang ‘asing’ (Yomiuri Shimbun 1999). Namun, keputusan peradilan lebih baru lainnya, sehubungan dengan kasus diskriminasi rasial, menolak kewajiban pemerintah lokal untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh ICERC (Arudo 2004). Pemerintah tampaknya tidak memiliki keinginan untuk menciptakan versi domestik dari konvensi tersebut, sesuatu yang seharusnya mengikuti proses ratifikasi. Konsekuensinya, Jepang mungkin adalah satu-satunya negara maju dimana diskriminasi rasial tidak dianggap sebagai ilegal.

Ulasan tentang keberadaan – atau tidak adanya – kebijakan multikultural di level negara, menunjukkan bahwa, secara praktis, hanya ada sedikit bukti konkrit tentang pelaksanaan multikulturalisme di Jepang kontemporer. Bahkan, salah satu ironi dari wacana ‘Jepang yang multikultural’ adalah bahwa para pengusungnya secara tipikal menghabiskan banyak halaman mendeskripsikan tentang Jepang yang sangat tidak multikultural tanpa menyadari bahwa deskripsi tersebut secara efektif telah menjatuhkan argumen ‘Jepang yang multikultural’ mereka. Suatu bab dari Befu (2006) berjudul ‘Diversity Dillema’ adalah contohnya: bab tersebut mendaftarkan sejumlah praktek-praktek diskriminatif dalam perumahan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan hukum kewarganegaraan, yang semuanya cukup untuk menghancurkan imaji ‘Jepang yang multikultural’ berulang-ulang. Seringkali, setelah mendaftar panjang sejumlah keluhan, para kritik tersebut akan menyebutkan satu contoh perkembangan sederhana – dan hampir selalu bersifat lokal – yang kemudian mereka angkat sebagai simbol yang menandakan bahwa Jepang sedang bertransformasi

menuju masyarakat multikultural. William (1993:93), contohnya, melihat keputusan pemerintah Kota Osaka pada tahun 1992 untuk membolehkan warga non-Jepang untuk bisa duduk dalam ujian masuk pegawai pemerintahan lokal sebagai suatu getaran raksasa dalam perubahan konsep kewarganegaraan Jepang. Demikian pula Clammer (2001:31) menganggap dihentikannya praktek yang mengharuskan penduduk asing[11] untuk memberikan sidik jari mereka sebagai sebuah tanda bahwa “Jepang, suka atau tidak suka, semakin menjadi masyarakat yang plural.” Padahal sebetulnya, Jepang sedang menjadi seperti apa atau akan menjadi seperti apa masih belum jelas. Satu-satunya yang jelas hanyalah Jepang seperti apa yang diinginkan oleh para penulis tersebut.

1.2.3. Migran dan Multikulturalisme

Dalam menguji apakah Jepang multikultur dalam arti politik, pertanyaan ketiga dan terakhir saya merujuk pada keberadaan migran yang terus menerus dan bertambah. Untuk itu, statistik migrasi adalah awal yang baik. Bahkan, walaupun ada sejumlah buku yang memfokuskan diri membahas tentang ‘Jepang yang multi-etnis’ (misal: Lie 2001; Murphy-Shigematsu 2004), wacana ‘Jepang yang multikultural’ mungkin dianggap sebagai sesuatu yang mengagetkan bagi para peneliti migrasi yang umumnya menganggap Jepang sebagai kasus yang tidak biasa atau ‘negatif’ (Bartram 2000). Angka statistik tampaknya menunjukkan fakta bahwa Jepang adalah satu dari sedikit negara industri yang tidak mengalami angka masuk migran internasional yang tinggi, yang menjadi karakter negara-negara maju lainnya:

Tabel 1: International Migration di Negara-negara G8 plus Australia, Korea[12]

| | Perkiraan <i>Migrant Stock</i> (2005) | | Jumlah Pengungsi | Net Migration (2000-2005) (Rata-rata Tahunan) | |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------------|---|-----------------------|
| | Jumlah | % Populasi | | Jumlah | Rasio per seribu jiwa |
| Kanada | 6106 | 18,9 | 141 | 210 | 6,7 |
| Perancis | 6471 | 10,7 | 140 | 60 | 1,0 |
| Jerman | 10144 | 12,3 | 877 | 220 | 2,7 |
| Italia | 2519 | 4,3 | 16 | 120 | 2,1 |
| Jepang | 2048 | 1,6 | 2 | 54 | 0,4 |
| Rusia | 12080 | 8,4 | 2 | 80 | 0,6 |
| UK | 5408 | 9,1 | 289 | 137 | 2,3 |
| AS | 38355 | 12,9 | 421 | 1160 | 4,0 |
| Australia | 4097 | 20,63 | 63 | 100 | 5,1 |
| Korea | 551 | 1,2 | 0 | -15 | -0,3 |

Sumber: (Perserikatan Bangsa-bangsa 2006)

Keterangan: Angka dalam ribuan jiwa. *Migrant Stock* merujuk pada mereka yang dilahirkan di luar negeri terkait, kecuali untuk Jepang dan Jerman, dimana data itu merujuk hanya untuk non-warga negara. *Net Migration* adalah jumlah imigran tahunan dikurangi jumlah tahunan emigran.

Mungkin akan muncul sejumlah masalah terkait dengan perbandingan data yang ada di Tabel 1, khususnya mengenai definisi ‘migran’. Di negeri-negeri ‘tujuan migran’ (Australia, AS, Kanada), hanya migran ‘permanen’ yang dihitung dalam statistik imigrasi resmi, sementara di negara lain siapa pun yang mendaftar pada pendataan populasi lokal (wajib bila telah melalui periode waktu tinggal tertentu) akan dihitung (OECD 2005:166). Dengan demikian, dalam kasus pertama, siswa internasional tidak akan diklasifikasi sebagai migran sedangkan dalam kasus kedua, siswa internasional akan dianggap sebagai migran. Kemudian juga, di negara-negara ‘tujuan’, imigran dianggap sebagai orang yang lahir di negeri luar, apa pun kebangsaan mereka, sementara di negara-negara lain imigran adalah orang yang berkebangsaan nasional. Oleh karena itu, kita melihat perbedaan dalam pemahaman konsep ‘orang asing’, yang di negara-negara ‘tujuan’ dianggap sebagai siapa pun yang berasal dari luar negeri, sedangkan di negara-negara ‘non-tujuan’ orang asing adalah termasuk mereka yang tinggal di dalam negeri.

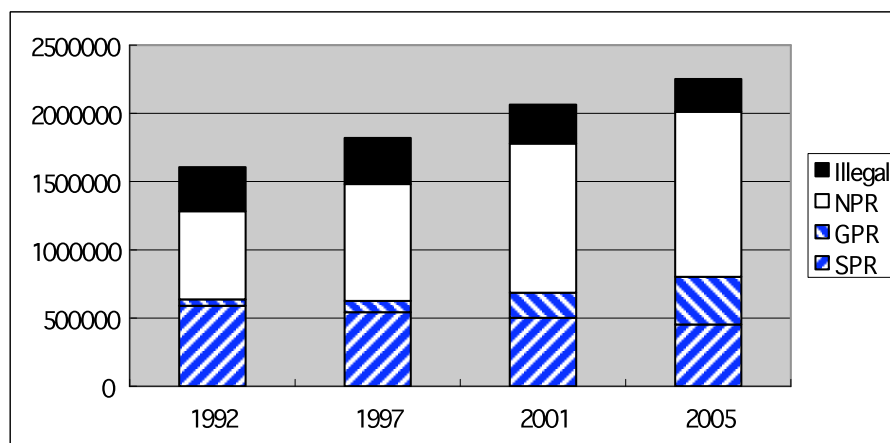
Dengan pemahaman seperti di atas, data di Tabel 1 perlu di re-evaluasi ketika melihat Jepang. Pertama-tama, termasuk dalam jumlah *migrant stock* dan angka migrasi bersih adalah penduduk non-permanen (*hi'eijusha*), seperti pelajar, peserta magang, dan ‘penghibur’ yang perlu mendaftarkan diri dalam periode 90 hari yang telah ditetapkan (NPR di Figur 1). Di Jepang, jumlah kelompok migran ini jauh melampaui *eijusha* atau penduduk permanen (GPR dan SPR di Figur 1). Jika individual non-permanen dimasukkan dalam data negara-negara ‘tujuan’ perbedaan antara Jepang dengan negara-negara tersebut akan semakin jauh.

Kedua, karena data masyarakat Jepang di Tabel 1 merujuk hanya untuk non-warga negara, mereka yang lahir di luar negeri namun kemudian dinaturalisasi tidak muncul dalam statistik. Pada prakteknya, karena Jepang memiliki angka naturalisasi yang relatif kecil, sebagian besar di antaranya adalah untuk orang Korea yang dilahirkan di Jepang, angka-angkanya tidak terlalu terdistorsi. Memang tanpa adanya data tempat kelahiran, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development / Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan – Organisasi ekonomi untuk negara-negara maju - penerjemah) menyamakan negara kebangsaan dengan negara kelahiran (OECD 2005:119); walaupun begitu, OECD menunjukkan bahwa metode penghitungan baru semacam itu akan “cenderung melebih-lebihkan angka kelahiran-asing relatif dengan negara-negara lain karena orang-orang yang dilahirkan di Jepang... bagi orang asing akan cenderung dianggap sebagai orang asing dan oleh karena itu akan diklasifikasikan sebagai kelahiran asing.”[13] Akibat inkonsistensi statistik ini, pada bulan Juli 2003, OECD menyingkapkan apa yang mereka klaim sebagai seperangkat data yang dapat diperbandingkan secara internasional. Dalam data ini, persentasi non-warga negara yang

ada di Jepang dihitung hanya 1,0%, bahkan jauh lebih rendah dari figur 1,6% ‘migran stock’ dari data PBB di atas.

Statistik tersebut menunjukkan bahwa, saat ini, Jepang adalah negara yang relatif homogen dalam hal migrasi dan etnisitas. Hasil survey yang ada mendukung ini. Sebagai contoh, pada survey kantor pemerintah tahun 2000, hanya 9,7% responden mengatakan bahwa mereka pernah berbicara atau berinteraksi dengan orang asing; lebih 40% berkata bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan orang asing. Tentu saja, beberapa penghuni asing, seperti orang Korea dan Cina generasi kedua atau ketiga, secara fisik dan kebudayaan tak bisa dibedakan dari orang Jepang; namun, yang sedang menjadi topik di sini adalah derajat asimilasi dan persepsi mengenai monokulturalisme relatif. Ini menunjukkan bahwa mungkin terlalu awal untuk mengklaim, seperti yang telah dilakukan beberapa orang (contohnya, Douglass dan Roberts, 2000) bahwa ‘jaman multikultural’ telah tiba di Jepang. Di lain pihak, apakah mungkin untuk berkata, seperti Yamanaka (2002, 2/22), bahwa “Jepang sedang berada di persimpangan untuk menjadi masyarakat multicultural... di fajar suatu masyarakat multi-etnis”? Apakah negeri Jepang telah mencapai apa yang Brody (2002:107) sebut ‘krisis multikulturalisme’, sebuah krisis dimana Jepang “perlu merekonsiliasikan ide-ide tradisional soal keanggotaan etnis, dengan kenyataan dari suatu populasi besar yang terdiri dari ‘ko-etnis’ yang berbeda-beda secara kultural”? Tentunya, walaupun Jepang adalah negeri dengan angka migrasi ke dalam yang rendah, angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun:

Figur 1: Perubahan Jumlah Penduduk Asing di Jepang, 1992-2005



Sumber: Angka tahun 2005 untuk pendatang ilegal adalah dari Homusho (2005:7/20). Data tahun 2005 lainnya dari Homusho Nyukoku Kanrikyoku (2006). Data non-2005 diambil dari Burgess (2003:16).

Catatan: GPR= *General Permanent Residents* (Penghuni Tetap Umum), dan SPR= *Special Permanent Residents* (Penghuni Tetap Khusus); keduanya adalah bagian dari kategori Penghuni Tetap (*eijyusha*). NPR= *Non Permanent Residents* (penghuni tidak tetap/*hi'eijyusha*). Angka untuk pendatang ilegal adalah perkiraan pemerintah.

Figur 1 menunjukkan bahwa sejak 1992, jumlah angka penghuni asing (legal dan ilegal[14]) telah meningkat hingga 40%, dari 1,29% dari total populasi pada tahun 1992 menjadi 1,76% dari total populasi tahun 2005. Namun persentase kenaikannya menjadi besar justru karena angka awalnya sangat rendah. Terlebih lagi, dengan jumlah total populasi telah mulai memasuki periode penurunan yang akan berlangsung lama, persentase orang asing dari total populasi akan terus meningkat bahkan walaupun jumlah mereka menjadi stabil.

Perihal kemungkinan peningkatan jumlah pendatang baru secara signifikan, banyak pengamat menunjuk banyak faktor sebagai penyebabnya – masyarakat yang semakin menua, jatuhnya angka kelahiran, sektor jasa dengan gaji rendah, kesenjangan pendapatan – yang membuat impor buruh luar negeri dalam jumlah besar menjadi ‘tak tertahankan’. Bagi Arudo (Japan Times 2004b), suara paling keras yang mengkritik wacana “Jepang yang homogen”, berargumen untuk atau melawan migrasi adalah ‘seperti berargumen untuk atau melawan matahari terbit’:

Masa depan Jepang sebagai suatu masyarakat multi-etnis tak dapat dihindari... tidak hanya tenaga kerja asing murah merupakan bagian intrinsik dari ekonomi Jepang, namun juga, sebagai negara adidaya ekonomi regional, ukuran ekonomi Jepang hampir setara dengan ukuran ekonomi semua ekonomi negara-negara Asia lainnya digabungkan. Faktor penarik ekonomi untuk para imigran tidak tertahankan. Imigrasi ke Jepang telah terjadi dan tidak akan berhenti... Trend imigrasi tidak mungkin dibalik. (Arudo 2006)

Murphy-Shigematsu mengambil posisi yang serupa:

Walaupun Jepang masih masuk dalam golongan negara maju dengan keragaman populasi yang rendah, dimana kelompok minoritas etnis dan nasional hanya 3%[15] dari total populasi, perubahan monumental akan segera terjadi. Gelombang masuk orang asing di tahun-tahun mendatang akan semakin tak tertahankan untuk memenuhi kebutuhan dari populasi yang semakin menua. Hanya untuk mempertahankan ukuran populasi pekerja saja membutuhkan 600 ribu imigran per tahun. Dalam skenario ini, para imigran akan mengisi 30% dari total populasi masyarakat Jepang pada tahun 2050. (Murphy-Shigematsu 2004:51)

Keyakinan Arudo dan perkiraan Murphy-Shigematsu seringkali senada dengan laporan PBB yang acap dikutip (2000a) berjudul “Migrasi Pengganti: Apakah ini Solusi bagi Populasi yang Menua dan Mengecil?” (*Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Aging Populations*). Laporan itu menawarkan lima skenario. Murphy-Shigematsu merujuk pada skenario 4, dimana populasi pekerja diperkirakan akan terus sama dengan level pada tahun 1995. Skenario 3, di mana populasi pekerja diperkirakan akan sama dengan level tahun 2005, memerlukan 381 ribu migran setahun antara tahun 2005 dan 2050. Skenario 1 dan 2, yang mengasumsikan tidak adanya migrasi ke

Jepang dari tahun 1995 ke 2050, meramalkan penggandaan populasi berusia 65 tahun atau lebih dan penurunan lebih dari setengah, rasio antara populasi usia produktif dengan usia pensiun, berakibat pada penurunan tahunan GDP yang cukup signifikan.

Ada sejumlah masalah dengan laporan PBB tersebut. Pertama, laporan tersebut dibuat berdasarkan pada tingkat kesuburan perempuan tahun 1995 dan mengasumsikan angka migrasi nol setelah tahun 1995. Tapi sebenarnya, tingkat kesuburan diperkirakan akan meningkat menurut perkiraan pemerintah (Japan Times 2007; Daily Yomiuri 2004c; 2006c) dan PBB (2004:209) dan, seperti ditunjukkan Figur 1, migrasi justru terus meningkat sejak 1995. Chapple (2004: catatan kaki 27) juga menunjukkan bahwa angka-angka dari PBB hanyalah perkiraan dan proyeksi tenaga kerja semacam itu sangat rentan terhadap perubahan siklus ekonomi, kemajuan teknologi dan semacamnya. Chapple mengutip ramalan-ramalan pemerintah sebelumnya tentang proyeksi kekurangan tenaga kerja yang ternyata salah (Komai 1995a:213). “Perlu dicatat” tambah Chapple dengan mengutip analisis Koshiro (1998:168) tentang suatu kajian pemerintah mengenai ongkos sosial dari masuknya setengah juta pekerja asing, “bahwa beban finansial terkait dengan peningkatan migrasi akan melebihi 1 triliun yen.” Dokumen PBB yang muncul kemudian (2000b:9) mengatakan bahwa walaupun perhitungan yang digunakan pada laporan sebelumnya valid secara demografis, perhitungan tersebut (1) tidak realistis secara ekonomis dan, terkait secara signifikan dengan konteks makalah ini, (2) tidak bisa diterima secara politis.

Poin utamanya adalah bahwa walaupun jawaban praktis, logis dan rasional terhadap masalah semakin menuanya populasi di negara maju adalah peningkatan angka migrasi, wacana lokal maupun global tentang migrasi membatasi jenis solusi politis yang mungkin dilakukan. Bahkan, dalam laporan PBB itu sendiri (2000a:50) diakui bahwa angka-angka yang disebutkan ‘sangat sulit dipenuhi’ oleh Jepang, suatu negeri yang tidak memiliki preseden menerima dan mengasimilasi orang asing dalam jumlah besar pasca Perang Dunia II. Laporan interim bulan Mei 2006 dari Panel bentukan Menteri Kehakiman tentang kebijakan jangka panjang untuk penerimaan pekerja asing merekomendasikan rasio penghuni asing dibandingkan populasi total tidak boleh melebihi 3% (Japan Times 2006b). Dengan kata lain, perbincangan jumlah migran sebesar 17%, 30%, atau (dalam scenario 5) 87% dari total populasi Jepang tidak hanya kurang realistis, namun juga, dalam banyak hal, tak bisa diucapkan dan tak terpikirkan, baik secara politik maupun secara populer. Kadang, pemahaman realitas wacana ini lebih tampak dalam jurnalistik daripada dalam tulisan akademis. Sebagai contoh, sebuah artikel di New York Times berjudul ‘*Insular Japan Needs but Resists Migration*’, Komai Hiroshi (mungkin adalah tokoh terdepan Jepang tentang migrasi) dikutip berkata demikian:

Angka-angka yang dibicarakan para pakar demografi adalah tak terbayangkan untuk Jepang... Dalam seperempat abad, kami hanya menyerap satu juta imigran (Komai, dikutip dari bahasa Perancis 2003)

Pandangan Komai bahwa Jepang tidak dapat menyerap pendatang baru didasarkan dari pemahaman realistis tentang keterbatasan sosial masyarakat Jepang, termasuk di dalamnya budaya tempat kerja dan sistem pendidikan.

Klaim terakhir yang sering didengar dari argumen tentang 'Jepang yang menjadi semakin multikultur' adalah bahwa keberadaan para pendatang asing telah 'mengancam' atau 'menantang' ide homogenitas masyarakat Jepang (mis.: Clammer 2001:177; Ishiwata 2004). Namun, argument ini pun tak begitu jelas; sebagaimana Tsuda (2003) tunjukkan dalam karyanya tentang Nikkeijin (bahasa Jepang untuk menyebut 'orang asing yang tinggal di Jepang' – penerjemah), 'Etnis Minoritas Terbaru Jepang' (*Japan's Newest Ethnic Minority*), penambahan jumlah migran dapat, secara terbalik, menegaskan dan memperkuat identitas etnis lokal dan wacana nasionalisme. Saya juga berpendapat bahwa pandangan keberadaan populasi asing telah 'mendorong debat panas tentang hak asasi manusia' dan 'mendorong perrefleksian tentang sifat alamiah masyarakat Jepang dan sikap etnis' (Clammer 2001:133) lebih punya makna di dalam koran berbahasa Inggris daripada yang berbahasa Jepang. Satu temuan dari kajian saya (Burgess 2003) tentang migran perkawinan internasional di Yamagata adalah bahwa walaupun para migran itu sendiri secara aktif mengubah hati dan pikiran orang-orang di tingkat akar rumput, anak-anak mereka bertumbuh, hampir tanpa perkecualian, dalam suasana monolingual dan monokultur, terasimilasi hanya dalam satu generasi.

1.3. Jepang yang Multikultur?

Untuk menyingkat diskusi di atas, kita dapat mengatakan bahwa, setelah menimbang semua, Jepang tidak terlihat multikultur dalam konteks baik wacana (1.2.1), kebijakan (1.2.2), ataupun masyarakatnya (1.2.3). Terlebih lagi, bahkan bila kita mempertimbangkan sedikit arah tiupan angin, baik secara domestik maupun secara global, tampaknya Jepang, walau pun kehadiran sejumlah NGO dan upaya pemerintah-pemerintah lokal yang progresif, tidak akan menjadi 'multikultural' dalam waktu dekat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang 'Jepang yang multikultur' atau dalam nada yang sama bukanlah tulisan yang deskriptif namun lebih preskriptif: tidak menjelaskan tentang Jepang seperti apa, namun bagaimana Jepang seharusnya.[16] Sebagian sebabnya mungkin adalah bahwa banyak penulis non Jepang tentang Jepang berasal dari Amerika, Australia, Inggris, atau negara-negara lain yang memiliki tradisi multikultur yang secara sadar ataupun tak sadar percaya pada konsep ideal multikultur. Dalam tingkat yang lebih luas, ada bahaya bahwa mereka yang menulis di Barat tentang Timur akan tergelincir pada oposisi biner superior-inferior. Pengaruh *Orientalisme* pada tradisi

barat studi Jepang masih belum benar-benar diperhatikan hingga sekarang (Minear 1980; Susser 1998). Sebagaimana ditunjukkan Clammer (2001:10), membuang semua ide tentang Nihonjinron, dimana sebagian dari ide tersebut berakar dari epistemologi lokal asli, dan mengatakannya sebagai omong kosong 'kaum nasionalis' sebenarnya merupakan tindakan 'etno-sentris, neo-kolonialis, dan bahkan rasis'. Memang bila membawa wacana multikultural hingga pada kesimpulan logisnya dapat mengancam – menurut Sugimoto (1999:94) – penelitian yang tidak sensitif terhadap euro-sentrisme atau bentuk-bentuk lain imperialisme budaya.[17]

Di samping bahaya preskripsi dan Orientalisme yang merayap masuk dalam dunia penelitian, faktanya adalah bahwa para ilmuwan yang berbasis di kawasan metropolitan seringkali terpengaruh oleh 'bias urban' saat melaksanakan penelitian mereka. Sebagaimana telah saya tuliskan di tempat lain (2007a), sejumlah besar penelitian tentang migran dan minoritas di Jepang cenderung terfokus pada apa yang disebut sebagai 'titik-titik keragaman' (Tsuneyoshi 2004:56) atau *shuju toshi*, yang merupakan kawasan urban dengan konsentrasi populasi non-Jepang yang bisa dilihat dengan jelas, seperti di Prefektur Kanagawa (Kota Kawasaki), Prefektur Shizuoka (kota Hamamatsu), Prefektur Gunma (Kota Ota), dan juga Tokyo dan Osaka. Karena tulisan-tulisan yang ada terfokus secara tidak seimbang pada migrasi tinggi yang terlokalisir itu, Jepang menjadi terlihat lebih 'multikultural' daripada sebenarnya. Ini tidak bermaksud mengatakan bahwa penelitian-penelitian tersebut tidak penting; tapi dalam rangka untuk membangun gambaran yang lebih luas dan seimbang tentang masyarakat Jepang, penting untuk melihat apa yang terjadi (atau yang tak terjadi) di luar daerah-daerah tersebut. Secara khusus, penting untuk mengenali perbedaan yang nyata antara pengalaman urban dengan pengalaman rural. Sebagaimana berbagai polling (misal oleh Kantor Kabinet, 2000) tunjukkan, terdapat jurang yang melebar antara kota-kota, tempat di mana orang mengatakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang asing, dengan kota-kota kecil dan desa-desa, dimana para responden berkata bahwa orang asing jarang terlihat.

Di sebuah tulisan di laman H-Japan baru-baru ini (29/6/06), Earl Kinmonth merujuk pada pernyataan dalam sebuah artikel di The Guardian (2005) tentang tiadanya perbedaan visual di jalan-jalan Jepang sebagai pernyataan yang 'benar-benar dungu' dan 'mengarah pada rasisme'. Kinmonth kemudian menggambarkan tingginya keterlihatan orang asing di daerahnya, Kita-ward di Tokyo. Tanggapan yang agresif dan emosional ini terhadap pendapat mengenai homogenitas etnis di Jepang adalah termasuk dalam apa yang pernah digambarkan oleh Clammer (2001:49/96) sebagai 'polemik panas' dan 'permusuhan' yang umumnya ditunjukkan pada ide Nihonjinron. Polemik semacam itu mengilustrasikan bahayanya menggantikan satu wacana (homogenitas) dengan wacana lainnya (multikulturalisme) tanpa pertama-tama memahami dulu bagaimana wacana berfungsi.

Sebagaimana Oguma tunjukkan dalam kutipan yang diletakkan di bagian paling awal tulisan ini, menghancurkan satu wacana dan menggantinya dengan yang lain tidaklah cukup. Tentunya, sebagaimana Ryang (2005:201) mengingatkan, kewaspadaan dibutuhkan sebelum merayakan arah baru studi Jepang, karena mengasumsikan suatu image tentang ‘Jepang yang multikultur dan multi-etnis’ dapat sama esensialisnya dengan imaji tentang Jepang yang monokultural.

Dalam tulisan-tulisan mengenai tradisi yang diciptakan (*invented traditions*) – teori mengenai bagaimana kenyataan dikonstruksi secara sosial – ditunjukkan (Notehelfer 1999:436/7) bahwa ideologi tidak dapat sepenuhnya dibuat manusia: agar ideologi bisa sukses, ideologi perlu ‘menggaungkan pengalaman-warisan’ di masyarakat luas, dan ‘memiliki akar dalam kehidupan dan pengalaman orang-orang biasa’. Demikian juga Jepang yang secara etnis relatif homogen dan perbedaan fisik yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari tetap rendah, paling tidak di luar ‘titik-titik keragaman’. Bagi Oguma (2002:348) alasan utama homogenitas relatif Jepang terletak pada kondisi internasional di abad-abad lalu. Tentunya, kami sebagai peneliti diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi secara empiris – dan objektif – fenomena yang sedang kami amati. Namun pada akhirnya, memperdebatkan apakah Jepang ‘homogen’ atau tidak, apa pun artinya itu, tidaklah semenarik mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa orang-orang percaya pada ide ini: “proses pembentukan”, tulis Ryang (2005:45), “adalah objek analisa yang lebih penting daripada menverifikasi benar-salah isinya.”

Kesimpulan: Wajah Migrasi yang Berubah

Dalam karya mereka (1986), Mouer and Sugimoto mengidentifikasikan dua penggambaran tentang masyarakat Jepang yang saling bersaing: ‘tradisi besar’ tentang ‘Jepang yang homogen’, dan ‘tradisi kecil’ yang saat ini mungkin dapat dilabeli sebagai ‘Jepang yang multikultur’. Dua puluh tahun kemudian, tidak terlalu aneh bila kita berkata bahwa wacana akademik yang dominan tentang Jepang bukanlah tentang ‘Jepang yang homogen’ melainkan tentang ‘Jepang yang multikultur’. Sebagaimana suatu wacana memungkinkan suatu topik untuk dibangun dengan cara tertentu, itu juga membatasi cara-cara lain mengkonstruksi topik tersebut (Hall 1992:292/3). Oleh karena itu, sulit – jika tidak tabu – untuk menantang kebijakan konvensional atau pandangan ‘umum’ di dunia akademis yang menyatakan bahwa homogenitas etnis adalah sebuah ‘mitos’ dan bahwa Jepang telah – atau paling tidak akan – menjadi multikultur. Wacana ini kontras bukan hanya dengan wacana lokal populer di Jepang, yang secara umum melihat negeri Jepang sebagai homogen, namun juga dengan wacana dominan global tentang migrasi, yang dalam tahun-tahun belakangan ini telah berubah menjadi negatif.

Makalah ini merupakan sebuah upaya untuk (1) mendorong perrefleksian tentang cara wacana akademis membatasi dan membentuk

apa yang kita tulis – dan bahkan apa yang dapat kita tulis – sebagai seorang akademis dan (2) menunjukkan bagaimana wacana lokal dan global populer, jauh dari ‘salah’ dan ‘mitos’, memainkan peran penting dalam pembentukan realitas sosial masyarakat Jepang. Dalam kajian tentang migrasi di Jepang secara khusus, karya-karya di masa depan akan diuntungkan dari pertimbangan tentang bagaimana wacana populer dapat mendirikan penghalang-penghalang psikologis, membungkam argumen ‘rasional’ dan menciptakan realitas sosialnya sendiri, bahkan jika hasilnya tampaknya merusak *national self-interest*.

Penulis :

Chris Burgess mengambil gelar PhD di Monash University, Melbourne. Sejak April 2004, dia menjadi pengajar penuh di *Tsuda Juku University (Tsuda College)*, Tokyo, dimana dia mengajar Studi Jepang dan Studi Australia. Penelitiannya terfokus pada migrasi dan identitas di Jepang dan termasuk makalah-makalah mengenai pernikahan internasional dan 'anak-anak pendatang' di Prefektur Yamagata. Lihat juga artikelnya yang lain di Japan Times pada tanggal 27 Maret 2007, '*Multicultural Japan' remains a pipe dream*.

Ini adalah versi revisi dan dipadatkan dari tulisan Burgess berjudul “The Discourse(s) of Mi “The Discourse(s) of Migration: Changing Constructions of the Other since 9/11”, Kokusai Kankeigaku Kenkyu (The Study of International Relations, Tsuda College), 33 (Maret). Ditampilkan di Japan Focus pada 24 Maret 2007.

Catatan:

[1] Ini adalah versi revisi dan dipadatkan dari tulisan Burgess (2007b), yang berisikan lebih banyak detail tentang konsep wacana secara umum dan wacana global tentang migrasi secara khusus. Saya hendak menunjukkan bahwa tulisan-tulisan sang pengarang sendiri, sampai baru-baru ini, terletak dalam wacana ‘Jepang yang multikultur’. Hanya baru-baru ini saya mulai mempertanyakan posisi saya. Saya ingin berterima kasih pada Mark Selden dan Joshua H. Roth atas komentar-komentar mereka pada draf awal. Laman Japan Focus tidak bisa menampilkan *macrons*; oleh karena itu saya minta maaf atas segala kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat hal tersebut.

[2] “Itu belum ditetapkan”, simpul Revell (1997: 74), “bahwa diskusi tentang kebudayaan di Jepang lebih meluas daripada diskusi tentang pentingnya kebudayaan di negara-negara lain.” Perbedaannya tentunya adalah bahwa diskusi di Jepang memiliki labelnya sendiri, sedangkan di luar Jepang tidak.

[3] Dimensi-dimensi perbedaan yang ‘lain’ ini mungkin sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada perbedaan berdasar etnis dalam memahami posisi kaum minoritas di Jepang. “Rendahnya status kebanyakan kelompok minoritas Jepang”, tulis Goodman (1990:9),

“mungkin lebih terkait pada marginalitas kelas mereka daripada karena alasan-alasan etnis atau budaya yang umumnya disebut-sebut.”

[4] Biasanya wacana dibedakan dengan ideologi, karena dalam ideologi ada pemisahan tradisional antara pernyataan (‘ilmiah’) yang benar, dan pernyataan (‘ideologis’) yang salah (Hall 1992a:292/3). Namun, perbedaan antara wacana dan ideologi sulit untuk dijaga. Ryang (2005:45) berargumen, ideologi sebaiknya dilihat bukan sebagai ‘kesadaran palsu’ namun sebagai sistem pemikiran yang nyata yang menciptakan realitasnya sendiri. Dengan memperlakukan konsep ‘kepribadian nasional’ sebagai sebuah formasi wacana ideologis (negara) atau sebagai wilayah “dimana baik intelektual dan orang awam berpartisipasi”, Ryang hendak menekankan bahwa konsep tersebut tidaklah terpisah dari kebudayaan Jepang yang ‘riil’ melainkan memiliki substansi yang nyata (Ryang 2005:45/60).

[5] Aso kemudian mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya berkata bahwa Jepang secara relatif homogen. Walaupun begitu, karena Nihonjinron dibingkai dalam oposisi langsung dengan wacana ‘Jepang yang multikultur’, posisi yang lebih lemah terkubur dan kita hanya bisa mendengar tentang ‘upaya-upaya keras pemerintah dan kelompok nasional untuk berargumen bahwa Jepang adalah budaya yang benar-benar homogen’ (Clammer 201:146). Ini menciptakan iblisnya sendiri, mengaburkan fakta, dengan memparafrase Clammer (2001:53), bahwa Nihonjiron seringkali ‘tidak lebih dari nostalgia yang dibesar-besarkan.’

[6] Pernyataan tentang homogenitas Jepang memang, saya percaya, memiliki koherensi yang cukup untuk dapat dianggap sebagai sebuah wacana. Saya hendak berargumen bahwa wacana tentang homogenitas tidak sama dengan Nihonjinron yang lebih lebar dan bersifat acak, yang tampaknya lebih mirip sekumpulan wacana yang bervariasi dan kadang-kadang kontradiktif.

[7] Nippon Keidanren, kelompok lobi bisnis paling kuat di Jepang, adalah suara yang paling keras menyerukan untuk pekerja asing yang lebih banyak. Ketua yang sebelumnya, Hiroshi Okuda, menyerukan agar pekerja dalam berbagai bidang agar diterima. Namun, ketua yang baru, Mitarai Fujio, tampaknya agak kurang terbuka dengan ide untuk memasukkan sejumlah besar tenaga asing ke Jepang, mencerminkan pergeseran global dalam wacana tentang migrasi (Japan Times 2006a).

[8] Hal ini, tentu saja, tidak dimaksudkan sebagai daftar yang eksklusif ataupun inklusif. Sebagai contoh, tidak semua masyarakat yang dianggap sebagai ‘multikultural’ (sekarang atau pun di masa lalu) menerima dan membolehkan kewarganegaraan ganda (Lihat Scalise dan Honjo 2004).

[9] Lebih jauh tentang masalah istilah-istilah seperti *kokusaika* (internasionalisasi), *kokusai koryu* (pertukaran internasional), *ibunka*

(perbedaan budaya), *kyosei* (hidup berdampingan), dan *tabunka* (multikulturalisme). Karena pentingnya penggunaan istilah-istilah ini dalam membicarakan tentang keragaman di Jepang – sebagai contoh, *tabunka kyosei*, adalah slogan resmi kota Kawasaki – cukup mengecewakan melihat istilah-istilah tersebut acap diterima pada nilai permukaannya saja tanpa analisis yang kritis.

[10] Lagi-lagi, adalah pemerintah lokal yang mengambil kepemimpinan dalam wilayah ini. Sebagai contoh, pada tahun 2005, prefektur Osaka memberikan penghuni asing yang telah tinggal di Jepang selama lebih dari 3 tahun hak untuk memilih dalam referendum lokal. Kabarnya ini adalah kebijakan pelopor pertama di Jepang (Harian Yomiuri 2005c). Lebih jauh lagi, ‘wilayah-wilayah’ keragaman lain, seperti Kawasaki dan Hamamatsu, telah mendirikan berbagai perkumpulan penghuni asing agar para individual tersebut memiliki suara sendiri dalam urusan-urusan lokal (Pak 1998; 2000). Akhirnya, langkah prefektur Miyagi akhir-akhir ini yang mencoba mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mempromosikan multikulturalisme dianggap sebagai contoh pertama dalam tingkat ataupun cabang pemerintahan manapun (J.F. Morris, H-Japan, 29/1/07). Tentu saja, sangat penting untuk tidak mengabaikan perkembangan-perkembangan ini sebagai perkembangan menuju multikulturalisme; namun saya khawatir orang terlalu membesar-besarkan ‘langkah-langkah bayi’ semacam itu.

[11] Pendataan sidik jari wajib telah dihilangkan bagi semua penghuni asing dari sejak 1 April 2000. Namun, dalam revisi Undang-undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (*Immigration Control and Refugee Recognition Law*) bulan Mei 2006, kebijakan itu diperkenalkan kembali untuk semua penghuni asing kecuali mereka yang memiliki status khusus, sebagai pencegahan atas terorisme.

[12] Pertanyaan apakah negara-negara tersebut dapat menjadi pembanding yang tepat adalah pertanyaan yang valid: ada banyak basis perbandingan yang lain. Tentunya betul bahwa negara-negara ‘tujuan’ tersebut, karena angka migrasi yang tinggi, adalah negara ‘unik’ oleh sebab keragaman etnis dan rasial mereka (Sugimoto 1997:30). Sugimoto (1997:8) meletakkan Jepang di ranking menengah dalam hal ‘perkiraan proporsi kelompok-kelompok etnis dan pseudo-etnis lainnya’ (tanpa memberikan definisi tentang ‘kelompok pseudo-etnis’). Earl Kinmonth (H-Japan, 2/7/06) juga berargumen bahwa perbandingan jumlah migran antara negara-negara yang memiliki perbatasan langsung (seperti Eropa) dengan negara yang secara geografis terisolasi (seperti Jepang) adalah perbandingan yang tidak adil. Tapi, poin yang diabaikan oleh para pengkritik tersebut adalah bahwa negara-negara semacam Austria, Bangladesh, Denmark, Republik Dominika, Yunani, Islandia, Libya, dan Portugal (negara-negara yang masuk dalam ‘kelompok bawah’nya Sugimoto) atau Korea, Meksiko, Hungaria, atau Slowakia (Kinmonth) menjadi pembanding yang sangat buruk bagi Jepang yang memiliki populasi

terbesar ke-9 dan ekonomi terbesar ke-2 di dunia. Jika kita menerima bahwa perbedaan penghasilan antara negara asal dan negara tempat tinggal sebagai faktor kunci ‘penarik’ para migran, maka perbandingan terbaik untuk Jepang – yang warganya dalam hal kekayaan neto per kepala adalah yang terkaya di dunia (Harian Yomiuri 2006b) – adalah negara-negara G8 yang menguasai sekitar 65% dari ekonomi dunia.

[13] Tentunya, situasi para *Zainichi* Korea, sebagai kelompok etnis minoritas terbesar di Jepang, perlu dipikirkan dengan hati-hati; namun, dalam rangka perbandingan tentang migrasi internasional, hanya generasi pertama orang Korea yang dapat dipandang sebagai migran. Dengan kata lain, kira-kira seperempat dari *migran stock* Jepang adalah individual *zainichi* generasi ke-2, ke-3, dan ke-4, secara umum telah mengalami asimilasi.

[14] Perkiraan angka migran ilegal – kebanyakan adalah yang menetap melewati batas waktu – mengalami penurunan signifikan dalam tahun-tahun belakangan, dari 323.090 orang pada tahun 1992 menjadi 240.000 orang pada tahun 2005. Ini sangat menarik, karena angka ini kontradiktif dengan argumen utama wacana mengenai ‘kejahatan oleh orang asing’ (*gaikokujin hanzai*), yaitu bahwa peningkatan angka migran ilegal telah membuat Jepang menjadi lebih kurang aman dari sebelumnya. Ini adalah satu kasus dimana sebuah pernyataan dari satu wacana tertentu dapat dibuktikan sebagai salah secara empiris. Betapa pun, wacana tersebut tetap terus memiliki realitas sosialnya sendiri; persepsi bahwa migran ilegal terus bertambah masih tetap kuat di masyarakat (Ellis dan Hamai 2007). Posisi Asosiasi Imigrasi Jepang (*The Japan Immigration Association*) bahwa keberadaan orang asing ilegal adalah “ancaman besar bagi masyarakat Jepang yang perlu diselesaikan segera” (Nyukan-Kyokai 2005:60) terus mendorong kebijakan pemerintah. Ini berarti bahwa hingga taraf tertentu, pemerintah terpaksa mempertahankan suatu kebijakan yang menargetkan satu kelompok yang, secara statistis, terus mengecil.

[15] Murphy-Shigematsu memperkirakan bahwa minoritas etnis dan nasional adalah 3% dari total populasi dan berarti berjumlah sekitar 3,8 juta orang. Kelompok etnis utama di Jepang adalah Ryukyujin (*etnis di Okinawa – penerjemah*) (1,3 juta jiwa), ‘pendatang lama’ Korea dan Cina (451.909 jiwa) dan orang Ainu (24.000 jiwa), dengan total 1.775.909 jiwa. Bahkan jika kita mendapatkan 300.000 lebih orang Korea yang, menurut Shipper (2002:55) telah dinaturalisasi menjadi warga negara Jepang sejak 1952, dan mungkin ditambahkan lagi 50.000 lebih warga naturalisasi non-Korea, jumlah totalnya hanya 2.125.909 jiwa. Hanya jika kita memasukkan penghuni ilegal dan non permanenlah kita mendapatkan angka yang mendekati 3,8 juta jiwa.

[16] Bagi Befu (2006:7), adalah asumsi Nihonjiron tentang Jepang yang *harus* (huruf miring dari dia) tetap mono-etnis dan homogen secara kultural yang menjadi penyebab perilaku diskriminatif terhadap

orang asing. Karena itu cukup ironis bahwa argumen-argumen yang ia bangun disandarkan pada premis yang sama preskriptifnya tentang bagaimana *seharusnya* Jepang menurut pandangan pribadinya.

[17] Oguma, yang telah memberikan banyak penjelasan berharga tentang wacana homogenitas, juga bersikap kritis tentang model multikultural yang 'teridealisasi'. "Ide mengenai kegagalan sistem kekaisaran dan masyarakat Jepang akan disadari", tulis Oguma (2002:346), "hanya jika Jepang terinternasionalkan, kesadaran tentang kemurnian darah hancur, dan Jepang akan menjadi negara multi-kebangsaan, semuanya didasarkan pada kesalah pahaman tentang Kekaisaran Jepang yang Agung. Ide ini tidak hanya salah, melainkan juga berbahaya". Penerjemah Oguma, David Askew (2002), menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan adalah pemahaman historis tentang berbagai konsep yang menjelaskan apa arti "Kejepangan": "[B]anyak kritik terhadap mitos homogenitas etnis dikembangkan dari optimisme tak berdasar bahwa penghancuran mitos ini akan menjadi obat yang ampuh bagi masalah-masalah yang dihadapi Jepang."

This article was translated by Dipo Siahaan <dipo@jpf.or.id> with the assistance of Susy Nataliwati <susy_aina@yahoo.com>, Muhamamad Surya <sunshinesan2000@yahoo.com> and Danarto Suryo Yudo <dsuryoyudo@yahoo.com>.

Bibliography

Aoki, Tamotsu

1990 'Nihon Bunkaron' no Hen'yo: Sengo Nihon no Bunka to Aidentitii (Changes in Discourses of National Identity: The Culture and Identity of Post-war Japan). Tokyo: Chuo Koronsha.

Arita, Eriko

2003 'Japanese Discrimination Against Korean and other Ethnic Schools' Japan Focus (Accessed 1/3/07).

Arudo, Debito

2006 'The Coming Internationalization: Can Japan assimilate its immigrants?' Japan Focus (Accessed 27/9/06).

2004 Japanese Only: The Otaru Hot Springs Case and Racial Discrimination in Japan. Tokyo: Akashi Shoten.

Asahi Shimbun

2000 'Muri na Kaiyaku (Impossible to take back)'. (April 13), p.39.

Askew, David

2002 'Melting Pot or Homogeneity? An Examination of Modern Theories of the Japanese Ethnicity'. *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies* (Accessed 18/9/06).

Bartram, David

2000 'Japan and Labor Migration: Theoretical and Methodological Implications of Negative Cases'. *International Migration Review* 34:1 (Spring), pp.5-32.

Befu, Harumi

2006 'Conditions of Living Together (kyosei)', in *Japan's Diversity Dilemmas: Ethnicity, Citizenship, and Education*. edited by Soo im Lee, Stephen Murphy-Shigematsu and Harumi Befu. Lincoln, NE: iUniverse, pp.1-10.

1987 *Zoho - Ideogii toshite no Nihon Bunkaron* (Enlarged edition: *Japanese Culture Theory as Ideology*). Kyoto: Shiso no Kagakusha.

Benedict, Ruth

1946 *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*. Boston: Houghton Mifflin.

Brody, Betsy

2002 *Opening the Door: Immigration, Ethnicity, and Globalization*. London and New York: Routledge.

Burgess, Chris

2007a 'Newcomer' Children in non-Metropolitan Public Schools: The Lack of State-Sponsored Support for Children whose First Language is not Japanese'. *Japan Forum* 19:1 (March), pp. 1-21.

2007b 'The Discourse(s) of Migration: Changing Constructions of the Other since 9/11', *Kokusai Kankeigaku Kenkyu* (The Study of International Relations, Tsuda College), 33 (March).

2004a '(Re)Constructing Identities: International Marriage Migrants as Potential Agents of Social Change in a Globalising Japan'. *Asian Studies Review: The Journal of the Asian Studies Association of Australia* 28:3 (September), pp.223-42.

2004b 'Maintaining Identities: Discourses of Homogeneity in a Rapidly Globalising Japan'. *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies* (April 19) (Accessed 29/9/06).

2003 '(Re)Constructing Identities: International Marriage Migrants as Potential Agents of Social Change in a Globalising Japan'. [Unpubl. Ph.D., Monash University, Melbourne].

Cabinet-Office

2006 'Jian ni Kansuru Seron Chosa (Survey about Public Safety)'. (Accessed 28/2/07).

2000 'Gaikokujin Rodosha Mondai ni Kansuru Seron Chosa (Survey on the Foreign Labourer Problem)'. (Accessed 18/9/06).

Cahoone, Lawrence

1996 'Introduction', in *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*. edited by Lawrence Cahoone. Cambridge and Oxford: Blackwell, pp.1-23.

Chapple, Julian

2004 'The Dilemma Posed by Japan's Population Decline'. *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies* (October 18) (Accessed 28/9/06).

Clammer, John

2001 *Japan and its Others: Globalization, Difference, and the Critique of Modernity*. Melbourne: Trans Pacific Press.

Daily Yomiuri

2006a 'Immigration Law Revised, Toughened'. (May 18), p.1.

2006b 'Wealthy Citizens'. (July 25), p.17.

2006c 'Government to Raise Target Figure for Births'. (Sept. 25), p.2.

2006d 'Japan to accept up to 1,000 Filipino nurses, caregivers'. (Sept. 12), p.2.

2006e 'New ID Card System Eyed for Foreigners'. (May 14), p.1.

2005a 'Tokyo Ban on Foreign Bosses Ruled Lawful'. (Jan. 27), p.1.

2005b 'Aso Describes Japan as 'One Race' Nation'. (Oct. 18), p.2.

2005c 'Foreign Residents of 3 Years to Vote in Local Referendum'. (July 1), p.3.

2005d 'Govt Plans to Compile Database on Foreigners'. (June 12), p.1.

2004a 'New Law Set to Toughen Penalties for Illegal Aliens'. (May 28), p.3.

2004b '70% Worried about Illegal Foreign Labor'. (July 25), p.2.

2004c 'White Paper says Birthrate could rise in next 5 years'. (Dec. 12), p.3.

Dale, Peter N.

1986 *The Myth of Japanese Uniqueness*. London: Routledge.

Douglass, Mike, and Glenda Susan Roberts (eds.)

2000 *Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of a Multicultural Society*. London and New York: Routledge.

Ellis, Thomas and Koichi Hamai

2007 'Crime and Punishment in Japan: From Re-integrative Shaming to Popular Punitivism' *Japan Focus* (Jan. 29) (Accessed 1/3/07)

French, Howard W.

2003 'Insular Japan Needs, but Resists, Immigration'. *New York Times* (July 24), p. A1, late edition.

Fujiwara, Masahiko

2005 *Kokka no Hinkaku (Style of a Nation)*. Tokyo: Shinchosha.

Fukatsu, Nobuko N.

2003 'Social Capital and Foreign Students in Japan: Case Study of Immigrant Step-Children'. [Unpubl. Master of Science, School of Education, Indiana University].

Fukuoka, Yasunori

2000 *Lives of Young Koreans in Japan*. Melbourne: Trans Pacific Press.

Goodman, Roger

1992 'Ideology and Practice in Japan: Towards a Theoretical Approach', in *Ideology and Practice in Modern Japan*. edited by Roger Goodman and Kirsten Refsing. London and New York: Routledge, pp.1-25.

1990 *Japan's 'International Youth': The Emergence of a New Class of Schoolchildren*. Oxford: Clarendon Press.

Graburn, Nelson, Ertl, John and R. Kenji Tierney (eds.)

forthcoming *Multiculturalism in the New Japan: Crossing the Boundaries Within*. Oxford and New York: Berghahn.

Graburn, Nelson, and John Ertl

forthcoming 'Introduction: Internal Boundaries and Models of Multiculturalism', in *Multiculturalism in the New Japan: Crossing the Boundaries Within*. edited by Nelson Graburn, John Ertl, and R. Kenji Tierney. Oxford and New York: Berghahn.

Gurowitz, Amy

1999 'Mobilizing International Norms: Domestic Actors, Immigrants, and the Japanese State'. *World Politics* 51:3, pp.413-45.

Hall, Stuart

1992 'The West and the Rest: Discourse and Power', in *Formations of Modernity*. edited by Stuart Hall and Bram Gieben. Cambridge: Polity Press, pp.275-333.

Homusho, (Ministry of Justice)

2005 'Dai 3 ji 2005 Shutsunyukoku Kanri Kihon Keikaku (The Third Basic Immigration Control Plan)'. (Accessed 16/9/06).

Homusho Nyukoku Kanrikyoku, (Ministry of Justice, Immigration Office)

2006 'Heisei 17 nenmatsu Genzai ni okeru Gaikokujin Torokusha Tokei ni tsuite (Statistics on the Number of Registered Foreigners as of December 31 2005)'. (Accessed 16/9/06).

2005 'Dai 3ji Shutsunyukoku Kanri Kihon Keikaku ni kansuru Iken Boshu (paburikku komento) no Jisshi Kekka ni tsuite (Public Feedback on executing the 3rd Immigration Control Basic Plan)'. (Accessed 14/9/06).

Ishiwata, Eric

2004 'Re-made in Japan: Nikkeijin Disruptions of Japan's Ethno-Spatial Boundaries'. *Japanstudien* (German Institute for Japanese Studies) 16, pp.91-117 (available at).

Iwasaki, Atsuko

2006 'Japan's Policy of Exclusion of Refugees' *Japan Focus* (Feb. 19) (Accessed 1/3/07)

Japan-Almanac

2005 Japan Almanac 2006. Tokyo: Asahi Shimbun Publishing Company.

Japan Times

2007 'Births Estimated to have Risen in '06 for First Time in Six Years'. (Jan. 1), p.1.

2006a 'New Keidanren Chief Urges Asia Diplomatic Thaw'. (May 25), p. 8.

2006b 'Foreigners Need 'Skills' to Live in Japan'. (Sept. 23), p.1.

2004a 'Pollees Warm to Foreign Labor Influx - and Tighter Controls'. (Sept. 14), p. 3.

2004b 'Japan and the Immigration Issue'. (Sept 14), p. 18.

JAR, (Japan Association for Refugees)

2006 'Nihon ni okeru Nanmin Nintei Shinsei oyobi Shori Su no Suii (Numbers of Applications for Refugee Status in Japan and Changes in How they were Dealt with)'. (Accessed 29/9/06).

Kagawa, Kozo

2001 'Legal Aspects of the Social Integration of Migrant Foreigners in Japan', in *International Migration in Asia: Trends and Policies*. edited by OECD. Paris: OECD, pp.99-112.

Komai, Hiroshi

2006 *Gurobaru-jidai no Nihon-gata Tabunkakyoseishakai* (Japanese Style Multicultural Society in the Global Era). Tokyo: Akashi Shoten.

2001 *Foreign Migrants in Contemporary Japan*. Melbourne: Trans Pacific Press.

1995a *Migrant Workers in Japan*. London: Kegan Paul International.

1995b *Teijuka Suru Gaikokujin (Foreigners Settling Down)*. Tokyo: Akashi Shoten.

1992 'Tan'itsu Minzokushugi wa Koerareruka: Nihon ni Okeru Tabunkashugi no Kanosei (Can the Myth of Homogeneity be Overcome? The Possibilities for Multiculturalism in Japan)'. Sekai, pp.88-96.

Koshiro, Kazutoshi

1998 'Does Japan Need Immigrants?' in *Temporary Workers or Future Citizens? Japanese and US Migration Policies*. edited by Myron Weiner and Tadashi Hanami. New York: New York University Press, pp.151-76.

Lie, John

2001 *Multiethnic Japan*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Maher, John C, and Nobuyuki Honna

1994 *Atarashii Nihonkan/Sekaikan ni Mukatte: Nihon ni okeru Gengo to Bunka no Tayosei (Towards a New Order: Language and Cultural Diversity in Japan)*. Tokyo: Kokusaishoin.

Maher, John C., and Gaynor Macdonald

1995 *Diversity in Japanese Culture and Language*. London: Keegan Paul International.

Maher, John C., and Kyoko Yashiro (eds.)

1995 *Multilingual Japan*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

McCormack, Gavan

1996 'Introduction', in *Multicultural Japan: Palaeolithic to Postmodern*. edited by Donald Denoon, Mark Hudson, Gavan McCormack and Tessa Morris-Suzuki. Cambridge: Cambridge University Press, pp.1-15.

Minear, Richard

1980 'Orientalism and the Study of Japan'. *Journal of Asian Studies* 39:3 (May), pp.507-17.

Mitsuaki, Sasaki, and Mariko Akuzawa

2001 'Mainoriti no Kodomotachi to Kyoiku (Minority Children and Education)', in *Mainoriti no Kodomotachi (Minority Children)*. edited by Akira Nakagawa. Tokyo: Akashi Shoten, pp.63-116.

Miyajima, Takashi, and Takamichi Kajita (eds.)

1996 *Gaikokurodosha kara Shimin e: Chiiki Shakai no Shiten to Kadai kara (From Foreign Workers to Citizens: From the Perspective of Local Society)*. Tokyo: Yuhaku.

Moriguchi, Hideshi

1997 *Esunikku Media Gaido (Ethnic Media Guide)*. Tokyo: Japan Mashinisuto sha.

Morris-Suzuki, Tessa

2003 *Asian Students Left in the Cold as Japan's Education System "Internationalizes"* (Accessed 1/3/07).

1998 *Re-Inventing Japan: Time, Space, Nation*. Armonk, New York: M.E. Sharpe.

Mouer, Ross, and Yoshio Sugimoto

1995 'Nihonjinron at the end of the Twentieth Century: A Multicultural Perspective', in *Japanese Encounters with Postmodernity*. edited by Johann P. Arnason and Yoshio Sugimoto. London and New York: Kegan Paul International, pp.237-69.

1986 *Images of Japanese Society: A Study on the Structure of Social Reality*. London and New York: Kegan Paul International.

Murphy-Shigematsu, Stephen

2004 'Ethnic Diversity, Identity and Citizenship in Japan'. *Harvard Asia Quarterly* (Winter), pp.51-57.

Nakamatsu, Tomoko

2002 'Marriage, Migration, and the International Marriage Business in Japan'. [Unpubl. Ph.D., Murdoch University].

Notehelfer, F.G.

1999 Review of 'Mirror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan' in *Journal of Japanese Studies* 25:2, pp.432-438.

Nukaga, Misako

2003 'Japanese Education in an Era of Internationalization: A Case Study of an Emerging Multicultural Coexistence Model'. *International Journal of Japanese Sociology* 12, pp.79-94.

Nyukan-Kyokai, (Japan Immigration Association)

2005 *Statistics on Immigration Control 2004*. Tokyo: Japan Immigration Association (Nyukan kyokai).

OECD

2005 *Trends in International Migration: Annual Report 2004 Edition*. Paris: OECD/Sopemi.

Oguma, Eiji

2002 *A Genealogy of 'Japanese' Self-Images*. Melbourne: Trans Pacific Press.

1995 *Tan'itsu Minzoku Shinwa no Kigen: 'Nihonjin' no Jigazo no Keifu (The Origin of the Myth of Ethnic Homogeneity: The Genealogy of 'Japanese' Self-Images)*. Tokyo: Shin'yosha.

Onuma, Yasuaki

1993 *Tan'itsu Minzoku Shakai no Shinwa o Koete: Zainichi Kankokujin/Chosenjin to Shutsunyukoku Kanri Taisei (Getting Over the Myth of The Homogeneous Society: Resident Koreans and the Management of the Immigration System)*. Tokyo: Toshindo.

Pak, Katherine Tegtmeier

2000 'Foreigners are Local Citizens Too: Local Governments Respond to International Migration in Japan', in *Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of a Multicultural Society*. edited by Mike Douglass and Glenda Susan Roberts. London and New York: Routledge, pp.243-74.

1998 'Outsiders Moving in: Identity and Institutions in Japanese Responses to International Migration'. [Unpubl. PhD, University of Chicago].

Revell, Lynn

1997 'Nihonjinron: Made in the USA', in Cultural Difference, Media Memories. edited by Phil Hammond. London and Washington: Cassel, pp.51-81.

Ryang, Sonia

2005 Japan and National Anthropology: A Critique. New York and London: Routledge Curzon.

Sekai

2004 'Hanzai Fuan Shakai Nippon (Japan - A Society Anxious about Crime)'. Sekai (July), pp.146-48.

Scalise, Paul J. and Yuki Allyson Honjo

2004 'Measuring Citizenship: Is Japan an Outlier?' JapanReview.Net (Accessed 28/2/07).

Shipper, Apichai W.

2002 'The Political Construction of Foreign Workers in Japan'. Critical Asian Studies 34:1 (March), pp.41-68.

Shiramizu, Shigehiko

2004 Esunikku Media Kenkyu: Ekkyo, Tabunka, Aidentiti (Ethnic Media Research: Transnationalism, Multiculturalism, and Identity). Tokyo: Akashi Shoten.

2000 'Global Migration, Ethnic Media, and Ethnic Identity'. Asian and Pacific Migration Journal 9:3, pp.273-85.

Song, Hesuk

2003 'Target of Scapegoating: Why does Discrimination towards Koreans Persist in Japan?' (Accessed 15/9/06).

Statistics, Office of Immigration (U.S.)

2006 'Annual Flow Report'. (Accessed 29/09/06).

Sugimoto, Yoshio

1999 'Making Sense of Nihonjinron'. Thesis Eleven 57 (May), pp.81-96.

1997 An Introduction to Japanese Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Susser, Bernard

1998 'EFL's Othering of Japan: Orientalism in English Language Teaching'. *JALT Journal* 20:1 (May), pp.49-82.

Suzuki, Nobue

2000 'Women Imagined, Women Imaging: Re/presentations of Filipinas in Japan since the 1980s'. *U.S. - Japan Women's Journal English Supplement* 19, pp.142-75.

The Guardian

2005 'Japan's failure to own up to its past threatens its future (April 23).

Tsuda, Takeyuki

2003 *Strangers in the Ethnic Homeland: Japanese Brazilian Return Migration in Transnational Perspective*. New York: Columbia University Press.

Tsuneyoshi, Ryoko

2004 'The 'New' Foreigners and the Social Reconstruction of Difference: the Cultural Diversification of Japanese Education'. *Comparative Education* 40:1 (February), pp.55-81.

United Nations

2006 'International Migration 2006 (Population Division, Department of Economic and Social Affairs)'.
2004 'World Population to 2300'. (Accessed 27/9/06).

2000a *Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Aging Populations?* New York: Population Division, Department of Economic and Social Affairs.

2000b 'Expert Group Meeting on Policy Responses to Population Ageing and Population Decline'. (Accessed 27/09/06).

Weiner, Michael (ed.)

1997 *Japan's Minorities: The Illusion of Homogeneity*. London: Routledge.

Weiner, Myron, and Tadashi Hanami (eds.)

1998 *Temporary Workers or Future Citizens? Japanese and U.S. Migration Policies*. New York: New York University Press.

Wikipedia

2006a 'Nihonjinron'. (Accessed 13/9/06).

2006b 'Multiculturalism'. (Accessed 16/9/06).

Williams, David

1993 *Japan: Beyond the End of History*. London: Routledge.

Yamanaka, Keiko

2002 'Transnational Activities for Local Survival: A Community of Nepalese Visa-Overstayers in Japan'. Oral Presentation, Chicago, Hilton Chicago and Hilton Palmer House: Annual Meeting of the American Sociological Association, August 16-19.

Yomiuri Shimbun

2006 'Gaikokujin Fukushisha o Yonin (Foreign Care Workers to be Allowed)'. (July 29), p.1.

2005 'Hanzai Kyoakuka: Tsunoru Kikikan (Increase in Heinous Crimes: Growing Sense of Crisis)'. (April 2), p.23.

2004a 'Nyukoku Shinsa Shukkokuchi de (Immigration Checks in Place of Departure)'. (June 4), p.1.

2004b 'Eijyugaikokujin Chiho Sanseiken Hoan: Shingiiri Shitemo Saiketsu wa Sakiokuri? (Permanent Resident Foreigners Local Political Participation Plan: Even if Deliberations take place, Vote to be Postponed?)'. (Nov. 14), p.4.

2004c 'Hoan mo Shingi mo Suji ga Toranai (Suffrage for Foreigners is Insufferable Nonsense)'. (Nov. 17), p.3.

1999 'Gaikokujin Nyuten Kyohi wa Iho (Denying Foreigners Entry to Shops Illegal)'. (Oct. 13).

1997 'Gaikokujin Ichiritsu Kyohi wa Iken (Denying Equality to Foreigners Unconstitutional)'. (Nov. 27), p.1.

Yoshino, Kosaku

1992 *Cultural Nationalism in Contemporary Japan*. London: Routledge.